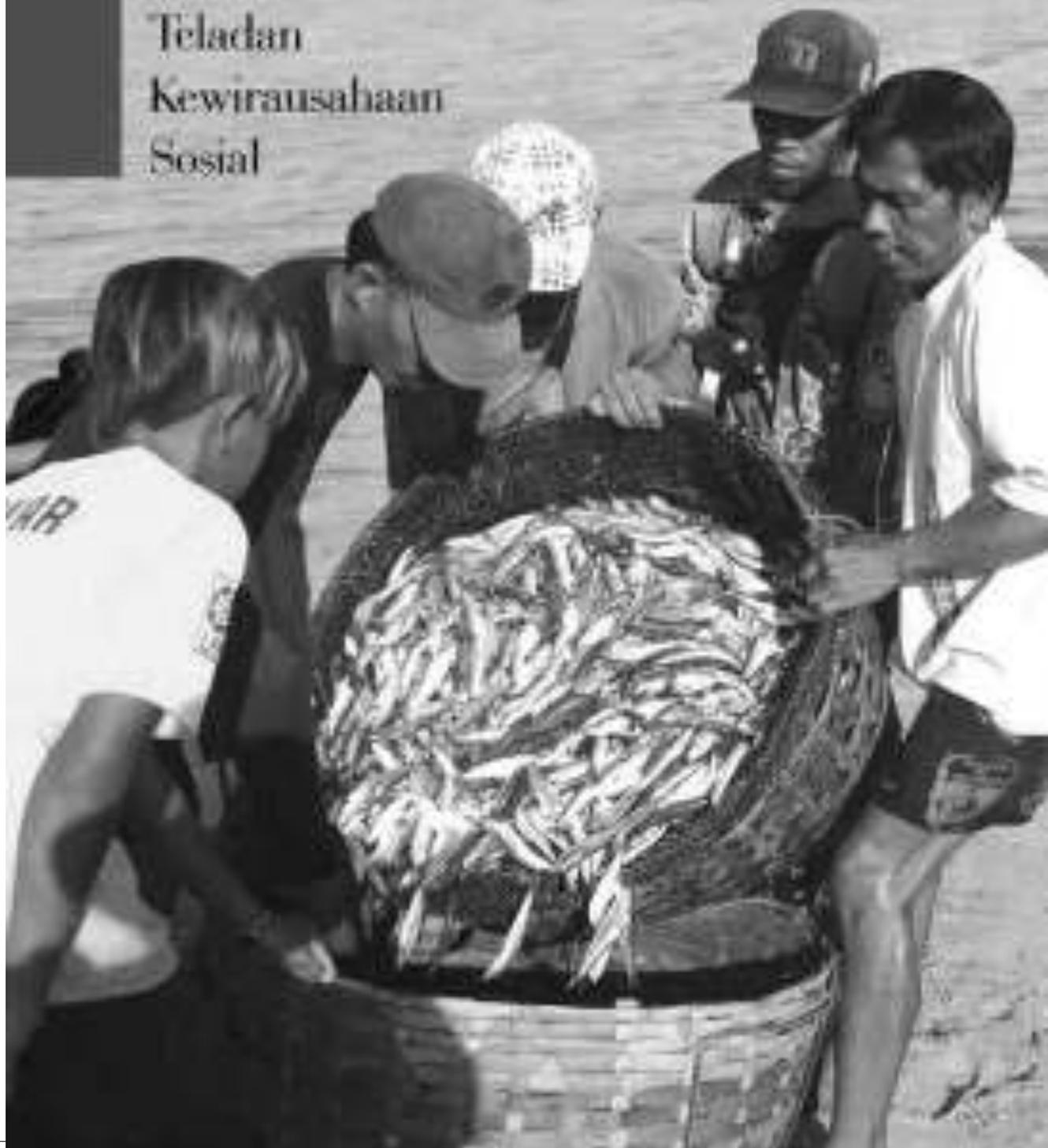


P2MKP

Teladan
Kewirausahaan
Sosial



P2MKP

Teladan Kewirausahaan Sosial

Diterbitkan oleh :

BPSDM

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Mina Bahari III

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16,

Jakarta Pusat

Penyusun :

Dr. Ir. Santoso, M. Phil

Mohammad Farkan, A.Pi, SE, M.Si

Editor :

IDAP Teguh Maharsari

Desain & Cetak :

PT. Sapta Visi Tama

17 x 23 cm | 124 halaman

Cetakan ke 1 : 2014

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 1 atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) 2 dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ISBN 978-602-18953-4-4

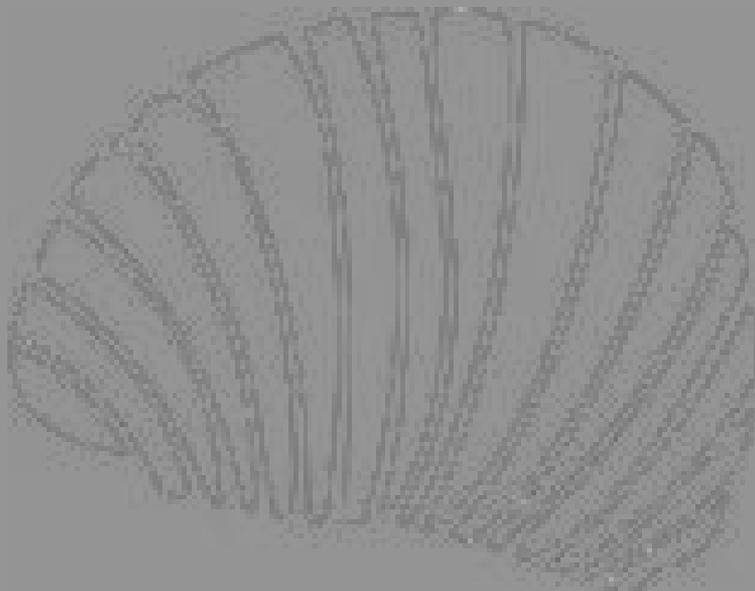




Tidak Semua Orang
Yang Punya Kesempatan Berbuat
Kebaikan Bagi Orang Lain Mau Melakukannya.
Di P2MKP, DNA Kebaikan Ditularkan, Sehingga Setiap
Orang Yang Menjadi Bagian Keluarga Besarnya
Terbiasa Dan Selalu Terpanggil Menolong Orang Lain
Untuk Mewujudkan Kehidupan Yang Lebih Baik Dan
Sejahtera. P2MKP Tidak Hanya Menularkan
Gelombang Energi Kebangkitan, Tapi Juga
Pesan Penting Bahwa Kesuksesan Jauh
Lebih Nikmat Jika Dinikmati Dengan
Lebih Banyak Orang.

Sambutan

Kepala BPSDM KP





Dr. Suseno Sukoyono

Kepada Badan Pengembangan SDM KP

Kewirausahaan sosial atau dikenal dengan *social entrepreneurship* memang sebuah gagasan baru. Namun demikian, elemen-elemen penting dibalik gagasan tersebut sebenarnya telah lama ada dalam diri masing-masing orang.

Peraih Nobel Perdamaian tahun 2008, Muhammad Yunus menyatakan bahwa energi, kegairahan, kreativitas, kewirausahaan dan hasrat untuk menjadikan dunia lebih baik adalah penggerak penting dibalik lahirnya gagasan kewirausahaan sosial yang menggugah hati banyak orang di dunia.

Kewirausahaan sosial dapat terwujud karena adanya kesamaan visi dari pihak-


"Social entrepreneurship is about innovation and impact, not income".
J. Gregory Dees.

pihak yang terlibat dan kemauan untuk saling bersinergi sehingga berlomba-lomba memberikan peran dan kontribusi terbaiknya.

Kewirausahaan sosial harus dilandasi gagasan kuat yang didukung

kemauan untuk mempertaruhkan komitmen dalam melakukan perubahan. Sebuah ajakan yang visioner, namun tetap harus realistis, karena visi dan ide besar tersebut akan diuji pada keberhasilan implementasinya.

Pembentukan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) sebagai mitra Unit Pelatihan Teknis (UPT) Pusat Pelatihan (Puslat) BPSDM KP awalnya didasari keinginan untuk menularkan

semangat kewirausahaan dan kemandirian kepada lebih banyak orang di seluruh penjuru Indonesia. Upaya ini juga ditempuh untuk memperluas jejaring pelatihan masyarakat, yang belum tersentuh program Puslat karena keterbatasan SDM dan fasilitas yang ada.

P2MKP yang merupakan mitra Puslat BPSDM KP menetapkan sejumlah syarat bagi wirausaha mandiri yang ingin bergabung. Salah satu, dan yang terpenting adalah kesediaan mereka untuk ikut membantu memberikan pelatihan kepada masyarakat disekitarnya dengan memanfaatkan ilmu, keahlian dan fasilitas yang mereka miliki.

Gerakan untuk membangkitkan semangat keswadayaan, kesadaran untuk membantu lingkungan yang dicontohkan P2MKP ini sejalan dengan semangat kewirausahaan sosial yang sekarang menjadi *concern* banyak pebisnis dan kalangan masyarakat lainnya diberbagai belahan dunia.

Meskipun baru berlangsung selama 3 (tiga) tahun, kehadiran P2MKP telah memberikan banyak makna penting. Kinerja dan kontribusinya dalam peningkatan kompetensi, kinerja, produktifitas, dan pendapatan masyarakat pada akhirnya juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan.

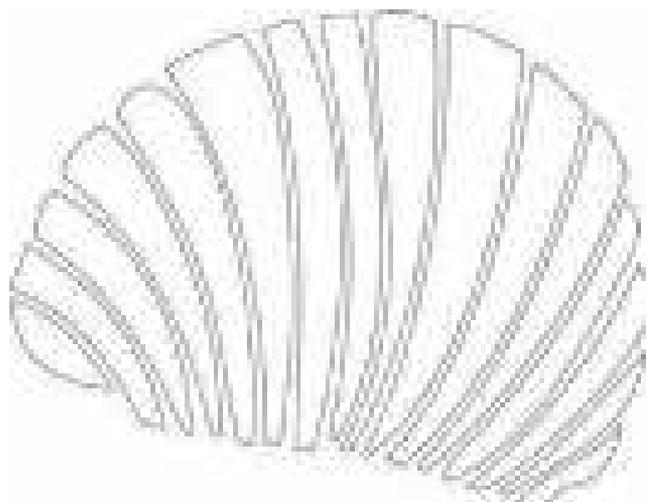
Prestasi lain yang juga menjadi kebanggaan, adalah perkembangan pesat P2MKP yang membuat beberapa

orang diantaranya telah dipercaya untuk melakukan pelatihan dengan skala yang lebih luas, bahkan hingga ke luar negeri.

Sederet catatan prestasi tersebut tentu sangat membanggakan, namun tidak boleh membuat kita puas diri. Tantangan terus berkembang, model dan pola pengembangan kewirausahaan sosial juga berkembang pesat.

Inovasi dan langkah-langkah terobosan perlu terus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, sehingga P2MKP tidak hanya sekedar eksis, tapi mampu memberikan warna, kekhasan dan manfaat yang lebih besar dibandingkan program yang digagas pihak lain.

Terimakasih atas dukungan dan kesediaan P2MKP diseluruh Indonesia yang dengan kesadaran dan keiklasan menjadikan program kewirausahaan sosial ini terus bergulir, semakin dikenal dan dirasakan manfaatnya.





Sambutan

Kepala Pusat Pelatihan KP





Dr. Ir. Santoso, M.Phil
Kepala Pusat Pelatihan BPSDM KP

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala hidayah dan rahmatNya sehingga penyusunan buku "P2MKP : Teladan Kewirausahaan Sosial", dapat diselesaikan.

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Puslat KP) selama ini telah menyelenggarakan berbagai kegiatan pelatihan pengembangan SDM KP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

Sasarannya adalah masyarakat sesuai prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang meliputi : minapolitan, industrialisasi, ekonomi biru, Pengembanan Usaha Mina Pedesaan (PUMP), Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) serta kelompok – kelompok pengembangan lainnya seperti

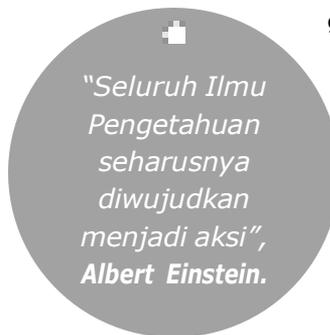
: Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT), POKDAKAN, Poklasar, POKWASMAS.

Program direktif Presiden melalui Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) dan program nasional lainnya seperti : MP3EI, MP3KI, pengarustamaan

gender (PUG), wilayah perbatasan juga telah dilakukan.

Kami bersyukur bahwa dengan berbagai upaya tersebut, jumlah masyarakat yang

dilatih tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2010 telah dilatih 2.040 orang, maka ditahun 2013 jumlahnya meningkat menjadi 21.180. Pelatihan aparatur juga meningkat. Di tahun 2010 tercatat sebanyak 1.108 orang, dan ditahun tahun 2013 jumlahnya meningkat menjadi 2.112 orang.



Peningkatan jumlah ini seiring dengan meningkatnya kemampuan penyelenggaraan pelatihan yang melibatkan langsung masyarakat dengan membentuk Pusat Pelatihan masyarakat yang dikenal dengan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP).

Hingga tahun 2013, jumlah P2MKP yang telah diakreditasi sebanyak 417 unit. Peningkatan *output* dan *outcome* pelatihan juga terlaksana berkat kerjasama dengan P2MKP, NGO, Pemerintah daerah dan *stakeholder* lainnya.

Menjawab tantangan era globalisasi dan masyarakat ekonomi Asean, Pusat berupaya keras menghasilkan lulusan pelatihan yang berdaya saing tinggi, efisien, profesional dalam pengembangan usahanya serta memantapkan kemandiriannya, melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK).

Terkait hal ini telah digunakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebanyak 15 unit, standar kompetensi kerja khusus 3 unit dan standar kompetensi Internasional yaitu : *International Maritime Organisation (IMO)* yang saat ini digunakan dalam sertifikat keahlian pelaut perikanan yaitu : Ankapin, Atkapin dan Basic Safety Training (BST).

Dalam proses ini, akreditasi lembaga pelatihan telah dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait dan organisasi internasional. Sedangkan Sertifikasi dilakukan oleh Kementerian/



lembaga terkait dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Hingga saat ini kami didukung 30 Tempat Uji Kompetensi (TUK) dengan 330 *assessor*.

Melalui berbagai upaya tersebut, kami berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan SDM KP yang terampil dan siap bersaing dalam era globalisasi yang semakin kompetitif.

Kami tentu berharap agar lulusan yang kami hasilkan mampu terus mengembangkan diri, dan usaha yang mereka tekuni. Khusus bagi para wirausaha mandiri dan tenaga kerja, kami berharap bahwa keikutsertaan mereka dalam program pelatihan kami membuat mereka memiliki keahlian yang sesuai tuntutan kebutuhan pasar.

Buku ini mengangkat beberapa upaya yang telah kami lakukan, dengan penekanan pada upaya kami

dalam membangkitkan semangat keswadayaan, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui semangat kewirausahaan sosial.

Ajakan untuk turun tangan dan ikut ambil bagian dalam melatih dan menyebarkan keterampilan yang dimiliki dari, oleh dan untuk masyarakat tersebut, kami harapkan dapat menyerupai gerakan bola salju (*snow ball*) yang terus bergulir, membesar dan meluas.

Kami sangat bersyukur bahwa ajakan yang digulirkan Puslat disambut antusias oleh masyarakat. Animo, dukungan dan peran serta masyarakat telah menjadikan program-program Puslat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat diseluruh Indonesia.

Dengan penerbitan buku ini kami berharap masyarakat dan *stakeholder* lainnya dapat semakin memahami tugas dan tanggungjawab kami, sehingga di masa yang akan datang dukungan

terhadap program-program kami pun semakin meningkat.

Disisi lain kisah-kisah inspiratif P2MKP, mitra kami yang luar biasa, semoga dapat memberikan motivasi kepada masyarakat luas untuk mengikuti jejak sukses, kemandirian dan keiklasan mereka dalam berbagi ilmu dan keterampilan.

Mari terus gulirkan semangat kewirausahaan sosial dengan memberikan manfaat seluas-luasnya kepada lingkungan dan masyarakat disekitar kita. Jadilah bagian dari tekad besar pemerintah untuk mengantarkan seluruh masyarakatnya menuju kesejahteraan.

Terimakasih atas dukungan berbagai pihak yang menjadikan program-program kami dapat terlaksana dengan baik.

Membangun
Sinergi,
Melipatgandakan
Kekuatan



Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPSDM KP (Puslat) memegang peranan penting dalam pengembangan SDM KP yang terampil. Sebagai salah satu bidang yang diberikan tugas dan tanggungjawab meningkatkan kapasitas SDM KP melalui pelatihan, Puslat menghadapi tantangan yang semakin besar.

Globalisasi dan segera tibanya era masyarakat ekonomi asean (*Asean Economic Community*) ditahun 2015, mendorong Puslat segera dan harus dengan sigap melakukan berbagai langkah penyesuaian, agar keberadaanya mampu memberikan nilai tambah bagi para *stakeholdernya*.

Di tengah berbagai keterbatasan terkait sumber daya dan prasarana, Puslat didorong untuk mampu mempercepat akselerasi pencapaian target dan prestasinya. Untuk menjawab tingginya tuntutan dan harapan tersebut, Puslat harus terus melakukan inovasi dan terobosan. Salah satunya dengan menginisiasi pembentukan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), pada tahun 2008.



"Jangan pernah terperdaya oleh keyakinan bahwa kalangan bisnis tidak perlu bertanggungjawab mengatasi berbagai masalah dunia, sebaliknya kalangan bisnis memiliki tanggungjawab yang besar untuk itu",
Anita Roddick.

Pembentukan P2MKP merupakan aksi nyata untuk mengajak para wirausaha mandiri yang bergerak dibidang kelautan dan perikanan yang sudah mandiri untuk ikut turun tangan bersama-sama Puslat melalui Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BP3) untuk melatih dan meningkatkan keterampilan para pelaku utama kelautan dan perikanan yang ada disekitarnya.

P2MKP sebagai kepanjangan tangan BP3 Puslat juga diharapkan perannya untuk ikut menciptakan tenaga kerja dan wirausaha baru, sekaligus melakukan pengawalan kepada para wirausaha baru hasil pelatihan BP3 dan P2MKP dalam menjalankan bisnisnya.

Upaya untuk memperluas jangkauan dan jaringan pelatihan kelautan dan perikanan masyarakat ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia yang saat ini jumlahnya masih sangat terbatas.

Dengan jumlah penduduk berkisar 237,64 juta orang, saat ini hanya 0,24% saja yang menjadi wirausaha. Prosentase tersebut jauh dari angka minimum yang dipersyaratkan bagi sebuah negara untuk

dikategorikan sebagai negara makmur yaitu 2%. (David Mc Clelland).

Dengan jumlah wirausaha 0,24% dari sekitar 237,64 juta penduduk, maka saat ini tercatat hanya ada 4,75 juta orang wirausaha. Untuk mencapai titik minimal saja, setidaknya kita masih membutuhkan sekitar 4,18 juta wirausaha baru.

Pekerjaan rumah bangsa Indonesia masih sangat besar, belum lagi jika melihat tingginya presentase jumlah wirausaha dinegara-negara maju, seperti Amerika Serikat yang memiliki sekitar 12% wirausaha, Cina dan Jepang yang memiliki sekitar 10% wirausaha, atau negara tetangga terdekat Singapura yang memiliki 7% wirausaha.

pilihan terbuka kepada semua orang, baik investor, pemerintah, individu, yayasan atau lembaga lain baik sosial maupun ekonomi untuk berlomba-lomba menyumbangkan pemikiran dan perannya masing-masing secara optimal.

Upaya Puslat untuk menghimpun para wirausaha mandiri KP melalui P2MKP, diinspirasi maraknya gerakan kewirausahaan sosial. Inisiatif ini mendapat sambutan antusias dari pelaku usaha. Mereka yang telah tergerak untuk ikut bergabung tentunya memiliki kesamaan visi, keiklasan dan kesediaan untuk berbagi serta menjadikan bisnis yang dijalankannya semakin mulia karena memberikan manfaat bagi orang lain.

MEMBANGKITKAN KESADARAN UNTUK BERGERAK BERSAMA

Kewirausahaan sosial menyadari bahwa tanggungjawab untuk memecahkan masalah-masalah sosial dapat dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan warga negara.

Pandangan dan sikap tersebut didukung kesadaran untuk memberikan

Gerakan kewirausahaan sosial yang dilakukan melalui P2MKP dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada para wirausaha mandiri untuk membantu pemerintah menjalankan kegiatan dan program pelatihan disekitar tempat tinggal/usahanya masing-masing.

Melalui upaya ini diharapkan akan tumbuh motivasi masyarakat untuk membangun usaha sendiri (berwirausaha). Seluruh kegiatan pelatihan tersebut, sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan pengetahuan P2MKP yang bersangkutan.

Lebih dari masalah keterlibatan, gerakan kewirausahaan sosial yang digerakan Puslat melalui P2MK, sesungguhnya merupakan bentuk pengakuan dan apresiasi pemerintah terhadap kemampuan individu-individu, warga masyarakat yang tidak dimiliki oleh pemerintah.

Melalui kemampuan individu-individu yang cerdas, berbakat, kreatif yang menyatakan kesediaan untuk bergandengan tangan dengan pemerintah tersebut, diharapkan akan lahir inovasi-inovasi yang dapat memperkuat atau bahkan menyempurnakan apa yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya.

Kewirausahaan sosial juga memiliki kemampuan yang besar untuk tumbuh cepat dan tak terbatas, mengingat fleksibilitasnya dalam bergerak, serta pertumbuhan dan aktivitasnya yang tidak dibatasi anggaran (limitasi anggaran), waktu dan tempat. Hal ini merupakan keunggulan tersendiri yang dapat mengisi kelemahan dari terbatasnya gerak

pemerintah terkait berbagai batasan yang dimilikinya.

Melihat berbagai keunggulan, kemampuan dan fleksibilitas yang dimilikinya, pengembangan kewirausahaan sosial dapat menjadi alternatif pemecahan masalah atas keterbatasan sumberdaya yang dimiliki pemerintah, dalam kaitan ini Puslat.

Besarnya animo, energi, semangat dan kegairahan masyarakat yang dibuktikan dengan terus bertambahnya kualitas dan jumlah P2MKP yang bergabung, telah memberikan harapan dan optimisme baru bagi penyelesaian problem-problem pemerintah dengan lebih cepat, tepat dan efektif.

Menyebarkan
Kewirausahaan
Sosial Melalui
P2MKP



KEWIRAUSAHAAN SOSIAL

G agasan tentang kewirausahaan sosial bergulir semakin cepat sejalan dengan terus meningkatnya kesadaran berbagai Perusahaan atau entitas bisnis lainnya untuk ikut memberikan kontribusi bagi lingkungan dan masyarakat disekitarnya.

Bisnis hari ini tidak hanya dituntut mampu menunjukkan kesuksesan dari sisi finansial, tapi juga semakin disoroti komitmennya dalam membantu penanganan berbagai problem sosial masyarakat disekitarnya.

Kewirausahaan sosial tidak berfokus hanya pada peralihan laba semata. Keberadaannya diharapkan mampu menyebarkan spirit, semangat yang besar untuk menggulirkan ide-ide pembaharuan yang membawa lingkungan dan masyarakatnya hidup lebih baik.

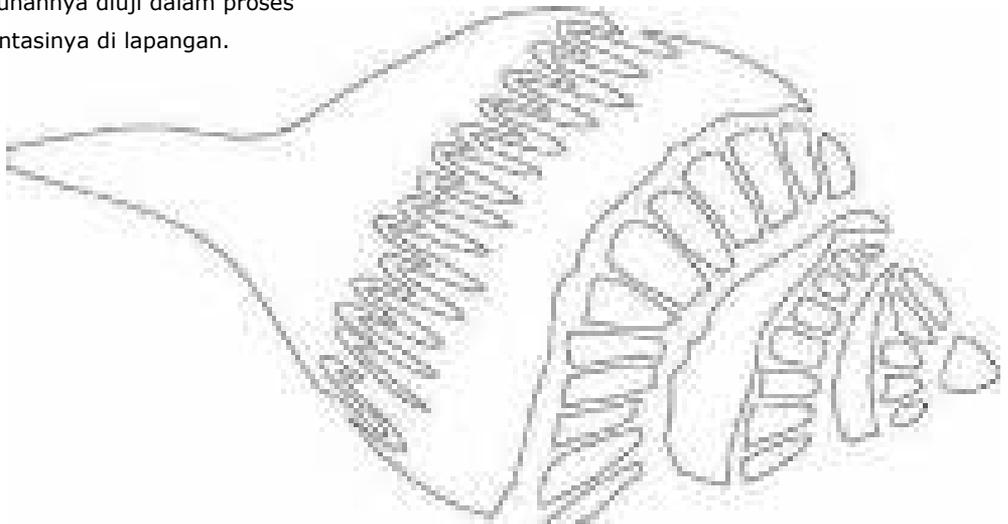
Sasaran prioritasnya diarahkan untuk memecahkan masalah sosial dengan menggunakan metode bisnis, termasuk dengan menciptakan dan menjual produk atau jasa.

Implementasi program Puslat melalui P2MKP yang menggunakan pendekatan kewirausahaan sosial dilandasi kesadaran yang sama antara pemerintah dengan masyarakat yakni bersama-sama mempercepat solusi keterbatasan ketersediaan SDM KP yang terampil.

Kesamaan visi dan *concern* ini menjadi modal sinergi dan pertumbuhan, yang kesungguhannya diuji dalam proses implementasinya di lapangan.

Secara umum kewirausahaan sosial dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Perusahaan tanpa rugi, tanpa dividen yang diabdikan untuk memecahkan masalah sosial dan dimiliki oleh investor-investor yang menginvestasikan kembali semua keuntungannya untuk mengembangkan dan meningkatkan bisnis.
2. Perusahaan pencari laba yang dimiliki oleh penduduk miskin, entah secara langsung maupun tidak langsung, demi suatu alasan sosial yang telah didefinisikan terlebih dahulu. Laba yang mengalir kepada penduduk miskin, akan kembali mengalir kepada mereka, yang artinya juga akan berkontribusi memecahkan persoalan sosial.



Hans Reitz, direktur *Grameen Creative Lab* (GCL) di Weisbaden, Jerman merumuskan 7 (tujuh prinsip) kewirausahaan sosial yaitu :

1. Tujuannya adalah mengentaskan kemiskinan atau masalah sosial lainnya seperti : pendidikan, kesehatan, akses teknologi, lingkungan dan lainnya, yang dapat mengancam manusia dan masyarakat, sama sekali bukan hanya untuk memaksimalkan keuntungan.
2. Perusahaannya tumbuh dan beroperasi secara berkelanjutan dalam hal finansial dan ekonomi.
3. Investor hanya akan mendapatkan kembali uang sejumlah yang diinvestasikannya. Tak ada dividen yang diberikan ketika investasi awal sudah kembali dan perusahaan terus menghasilkan keuntungan.
4. Ketika dana yang diinvestasikan dibayarkan kembali, laba tetap diambil oleh perusahaan untuk perluasan dan perbaikan.



5. Perusahaan akan bersikap ramah lingkungan.
6. Angkatan kerja mendapatkan upah sesuai pasaran tetapi dengan kondisi kerja diatas standar.
7. Dikerjakan dengan senang hati.

Sisi lain yang tak kalah menarik dari pengertian ini adalah kemampuan kewirausahaan sosial dalam memainkan peran sentral sebagai agen perubahan sosial dengan menerapkan beberapa hal seperti

1. Mengadopsi misi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai sosial (nilai bukan hanya individual).
2. Mengenali dan terus menerus mengejar peluang baru untuk melaksanakan misi yang telah ditetapkannya.
3. Terlibat dalam proses inovasi, adaptasi dan pembelajaran secara terus-menerus.
4. Bertindak berani tanpa dibatasi kekhawatiran akan ketersediaan sumber daya yang dimiliki saat ini.

- Menunjukkan rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap akuntabilitas kepada lingkungan/masyarakatnya dalam setiap upaya yang dilakukannya.

Gregory J. Dees,
 teaches Social Entrepreneurship and
 Non Profit Management at the Fuqua School
 of Business at Duke.

Terkait kemampuan sebagai agen perubahan, P2MKP tidak hanya mampu mengatasi masalah keterbatasan fasilitas dan tenaga untuk mengejar

ketertinggalan SDM KP terampil, namun telah terbukti mampu menularkan semangat kewirausahaan tidak terbatas dilingkungannya namun hingga melampaui batas negara. Ini tentu prestasi yang membanggakan.



Pusat Pelatihan
**Kelautan Dan
Perikanan**
(PUSLAT)



SDM KOMPETEN ADALAH JAWABAN

Apa lagi yang kita ragukan dengan kekayaan alam kita? Dengan jumlah penduduk sekitar 237 juta (terbesar ke-empat didunia), posisi strategis geo ekonomi (berada di jantung lalu lintas perekonomian dan perdagangan global), Indonesia punya potensi yang sangat besar untuk tumbuh menjadi negara besar dengan masyarakat yang makmur dan

sejahtera. Sinergi manusia dan kekayaan alam adalah modal, dengan manusia (*people*), sebagai porosnya.

Sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan pembangunan, tak terkecuali di sektor kelautan dan

perikanan. SDM kelautan dan perikanan yang kompeten sangat dibutuhkan perannya untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan laut yang melimpah.

Jika saja kekayaan kelautan dan perikanan Indonesia dikelola dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab, maka tidak diragukan lagi sektor kelautan dan perikanan Indonesia akan menjadi motor penting penggerak perekonomian nasional.

Sebagai negara kepulauan dan maritim, Indonesia memiliki 17.480 buah pulau dengan wilayah perairan laut seluas 5,8 juta km², 3,1 juta km² diantaranya adalah laut teritorial dan 2,7 juta km² sisanya adalah laut zone ekonomi eksklusif (ZEE).

Wilayah perairan laut tersebut memiliki potensi sumberdaya dapat pulih (*renewable resources*) dan bahkan dikenal sebagai *marine mega-biodiversity*, serta sumberdaya tidak pulih (*unrenewable resources*) seperti energi kelautan dan jasa-jasa lingkungan kelautan.

Potensi perikanan Indonesia yang terdiri dari potensi perikanan tangkap dan potensi perikanan budidaya, tidak kalah hebat. Dengan kondisi perikanan tangkap yang mengalami lebih tangkap (*over fishing*) di beberapa wilayah perairan saat ini, secara keseluruhan tingkat pemanfaatann potensi ini baru mencapai 77,80% dari potensi lestari yang ada (KKP, 2011). Disisi lain potensi lestari perikanan tangkap di perairan umum yang besarnya 0,9 juta ton/tahun, tingkat pemanfaatannya baru sekitar 50% saja.

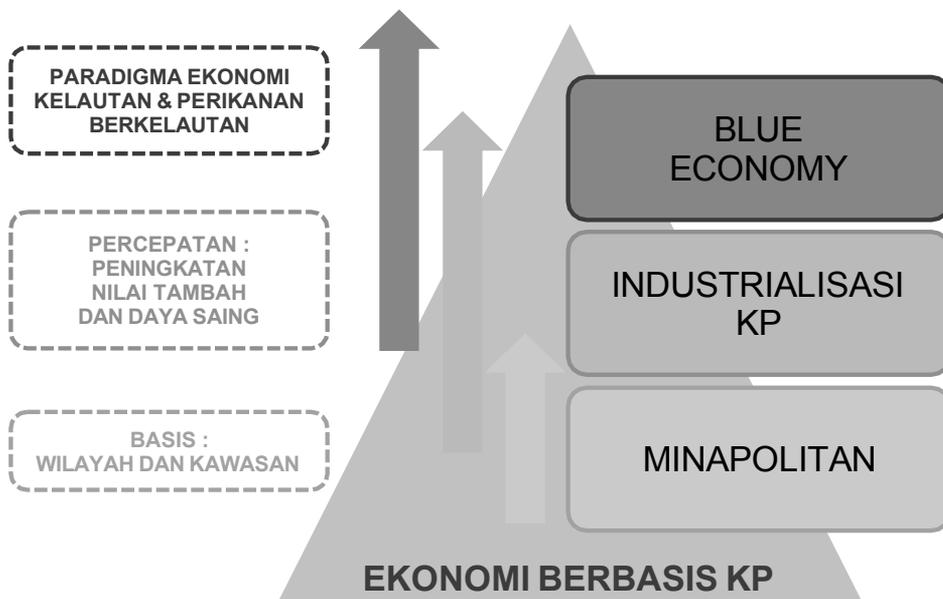
Potensi perikanan budidaya yang terdiri dari budidaya di perairan laut, budidaya di perairan payau (tambak) dan budidaya di perairan tawar mencapai 672,90 juta hektar dengan potensi produksi sekitar 65,00 juta ton/tahun tak kalah menarik.

Dari potensi perikanan budidaya tersebut, jumlah produksinya di tahun 2011 baru mencapai 6,98 juta ton, atau sekitar 10,74% saja dari potensi produksi yang ada.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan di sektor kelautan dan perikanan, khususnya sub sektor perikanan masih memiliki peluang yang sangat besar untuk tumbuh dan memberikan kontribusi yang semakin signifikan dimasa-masa yang akan datang.

Agar dapat lebih fokus menggarap besarnya potensi dan peluang tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan tiga pilar dasar pengembangan ekonomi berbasis KP yaitu : minapolitan, industrialisasi dan ekonomi biru (*Blue Economy*) melalui pengembangan SDM kompeten dan profesional yang dilakukan dengan pendekatan strategis pelatihan.

Bagan :
Arah Kebijakan
Pembangunan Kelautan dan Perikanan



Pelatihan mendapatkan perhatian mengingat aktivitasnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan berbagai persoalan riil yang dihadapinya.

Sebagai salah satu bidang yang diberikan tanggungjawab meningkatkan kapasitas SDM KP melalui pelatihan, Pusat Pelatihan Kelutan dan Perikanan (Puslat KP) memiliki posisi strategis, dengan beberapa alasan sebagai berikut :

1. Topik pembelajaran dalam kegiatan pelatihan dapat dirancang segera untuk memenuhi kebutuhan mendesak (*urgent*) disertai masukan-masukan terkini.
2. Pengalaman dalam kegiatan pelatihan, topik dan proses pembelajaran, dapat dijadikan bahan untuk melakukan penyempurnaan melalui proses updating baik kurikulum pelatihan berbasis kompetensi

maupun kurikulum program pendidikan formal.

3. Para akademisi, peneliti dan pelaku usaha yang berpengalaman adalah pelatih potensial untuk topik-topik baru sudah tersedia.

Disisi lain tantangan yang dihadapi Puslat juga semakin besar. Sejalan dengan segera tibanya era globalisasi dan masyarakat ekonomi asean (*Asean Economic Community*) ditahun 2015, Puslat KP harus segera melakukan berbagai langkah terobosan strategis untuk menjawab tantangan yang sudah di depan mata.

Beberapa langkah antisipasi juga telah dilakukan diantaranya : pengembangan kelembagaan, perumusan orientasi yang obyektif, dan pengembangan dengan pendekatan yang sistematis.

Pengembangan yang dilakukan Puslat berlandaskan kondisi dan pengalaman saat ini yaitu keberadaannya sebagai lembaga yang diberikan tugas, tanggungjawab dan dukungan oleh berbagai pihak untuk tumbuh menjadi unit kerja yang semakin strategis di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Perlu disadari bahwa keberhasilan pencapaian tugas dan tanggungjawab Puslat dalam penyelenggaraan pelatihan tidak akan terwujud optimal tanpa adanya dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

Kerjasama yang harmonis sangat dibutuhkan dengan unit eselon I teknis lingkup KKP, kementerian terkait (Kemenakertrans, Kemdiknas), Dinas kelautan dan perikanan, pemda, perguruan tinggi, P2MKP, LSM, industri perikanan maupun masyarakat kelautan dan perikanan secara umum.

Melalui berbagai dukungan dari berbagai pihak tersebut, Puslat siap mewujudkan "Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat", yang salah satu strategi mensyaratkan penguatan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan.

Puslat dalam rangkaian tugasnya juga ikut mendukung upaya-upaya pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran hingga 5,1 % pada tahun 2014. Untuk mewujudkannya diperlukan upaya prioritas untuk menciptakan lapangan pekerjaan formal, informal, program padat karya dan penyelenggaraan program aksi Gerakan Penanggulangan Pengangguran (GPP) di berbagai daerah maupun sektor.

Peningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan mengembangkan jiwa kewirausahaan kepada para pengangguran terlatih, diantaranya dapat menjadi alternatif solusi percepatan penurunan angka pengangguran sesuai yang ditargetkan pemerintah. Secara spesifik pemerintah juga telah menetapkan lima pilar kerangka aksi nasional penciptaan lapangan kerja untuk mempercepat akselerasi penurunan tingkat pengangguran yang mencakup:

1. Perbaikan layanan dan sistem informasi ketenagakerjaan;
2. Peningkatan ketrampilan dan kapasitas pekerja;



3. Penciptaan lapangan kerja melalui UMKM dan kewirausahaan;
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur termasuk infrasturktur berbasis komunitas; Program darurat penciptaan lapangan kerja.

Kelima pilar tersebut mengacu pada 3 (tiga) kebijakan ketenagakerjaan yaitu : Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku utama dan usaha, pengembangan kapasitas pelaku utama dan usaha dan masyarakat lainnya serta penguatan kelembagaan dan pengembangan pasar.

MENJAWAB KESENJANGAN KEBUTUHAN SDM KP

Dasar penyelenggaraan pelatihan kelautan dan perikanan adalah Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas) yang mensyaratkan adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen pelatihan kerja untuk mencapai tujuan pelatihan kerja nasional.

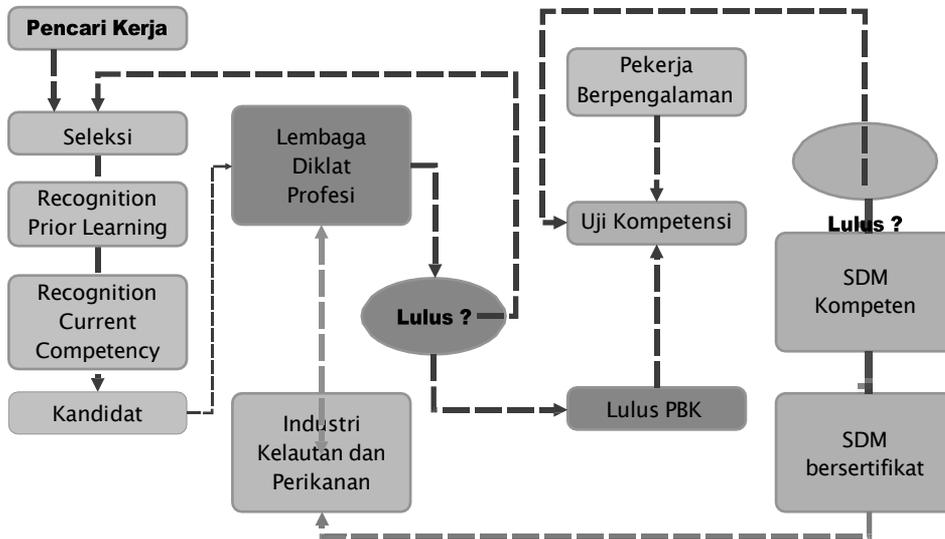
Tujuan pelatihan kerja nasional adalah terciptanya tenaga kerja Indonesia yang kompeten, profesional dan produktif dalam melaksanakan tugas pekerjaannya.

Setiap tenaga kerja, sesuai dengan kemampuannya, dapat mengikuti pelatihan kerja untuk menguasai jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu.

Pelatihan kerja dimaksud haruslah berbasis kompetensi, yang komponen pokoknya terdiri dari:

1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
2. Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
3. Sertifikasi Kompetensi Profesi.

Keterkaitan di antara kegiatan pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan latihan profesi, sertifikasi berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi dan kebutuhan lapangan pekerjaan yang ditentukan oleh kalangan industri.



Kegiatan pelatihan kelautan dan perikanan saat ini diselenggarakan oleh 6 (enam) balai pendidikan dan latihan dan satuan penyelenggara pelatihan di kalangan masyarakat pelaku usaha yang disebut Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan atau P2MKP.

Dengan berbagai keterbatasan yang ada saat ini, pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan

(SDM KP) masih fokus untuk memenuhi kebutuhan kegiatan-kegiatan produktif konvensional, seperti : penangkapan ikan, budidaya ikan, pengolahan dan pemasaran ikan.

Untuk memenuhi jenis-jenis kebutuhan SDM dibisnis konvensional tersebut saja, saat setidaknya diperlukan sekitar 2.500.000 SDM terampil, jumlah yang sangat besar.

Masalah SDM KP terampil tidak hanya terkait kekurangan dari sisi jumlah saja. Kendala keterbatasan latar belakang pendidikan masyarakat kelautan dan perikanan yang berpengaruh terhadap kompetensi sebagian besar pelaku kegiatan produktif perikanan dan kelautan tersebut, menjadi pekerjaan rumah baru yang membuat tugas Puslat semakin menantang.

Proyeksi kebutuhan sumberdaya manusia untuk jenis bisnis konvensional pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan 2011-2014 (Sumber: Pusdik 2011).

No.	Jenis usaha dan level jabatan dalam usaha	Kebutuhan (orang)/tahun			
		2011	2012	2013	2014
Penangkapan Ikan					
1	Manajer	588	600	612	624
2	Supervisor	2.942	3.001	3.061	3.122
3	Teknisi	4.658	4.751	4.895	4.993
4	Pelaksana	11.246	11.471	11.700	11.934
Budidaya Ikan					
1	Manajer	37.745	33.971	30.574	27.516
2	Supervisor	75.490	67.941	61.147	55.033
3	Teknisi	1.039.535	935.582	842.024	757.821
4	Pelaksana	2.185.036	1.966.533	1.769.879	1.592.891
Pengolahan/Pemasaran Hasil Perikanan					
1	Manajer	1.277	1.915	2.234	2.553
2	Supervisor	2.553	3.830	4.468	5.106
3	Teknisi	7.659	11.489	13.404	15.319
4	Pelaksana	15.319	22.978	26.808	30.637
Jumlah Kebutuhan SDM					
1	Manajer	39.610	36.486	33.420	30.694
2	Supervisor	80.986	74.772	68.676	63.261
3	Teknisi	1.051.853	951.822	860.322	778.132
4	Pelaksana	2.211.601	2.000.982	1.808.387	1.635.463

Beban balai-balai tersebut termasuk besar mengingat ada berbagai kompetensi yang perlu dikuasai oleh setiap jenis jabatan dalam unit usaha untuk setiap jenis usaha perikanan.

Jika ditambah dengan jenis-jenis usaha non-konvensional, seperti pengelolaan konservasi perairan, pariwisata bahari, pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dan kegiatan produksi kelautan non-konvensional, maka beban balai-balai tersebut menjadi semakin besar.

Memperhatikan perkembangan terkini, termasuk komitmen Indonesia dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, tantangan sekaligus peluang lapangan pekerjaan di bidang kelautan dan perikanan menjadi semakin besar.

Stakeholder kelautan dan perikanan di kawasan regional dan global kini semakin sadar atas kualitas produk dan jasa sehingga ada tuntutan khusus terhadap para pekerja untuk semakin kompeten dan profesional. Sejalan dengan dinamisnya dinamika regional yang ditandai

gencarnya upaya para negara anggota ASEAN untuk mewujudkan sebuah masyarakat ekonomi, yaitu *ASEAN Economy Community*, maka upaya-upaya pengembangan SDM-KP di Indonesia tidak cukup lagi hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan SDM domestik

Indonesia, tetapi juga memenuhi kebutuhan regional dan global.

Kesadaran terhadap perubahan lansekap bisnis tersebut harus dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM KP agar dapat menjadi bagian dari pertumbuhan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan global baik dikawasan regional maupun dunia.

Untuk mengawal para pelaku utama berkiprah setidaknya di kawasan ASEAN, BPSDM-KP harus mengembangkan kelembagaan Pusat Pelatihan agar mampu memenuhi tuntutan kebutuhan regional tersebut. Pengembangan kelembagaan tersebut harus disertai pengembangan strategi serta

melengkapinya dengan sarana dan prasarana yang diperlukan.

Strategi terpenting dalam pengembangan kelembagaan adalah: (1) menyempurnakan pendekatan pelatihan dengan standar yang menerapkan sistem berbasis kompetensi secara lengkap, (2) pengelolaan yang berbasis jejaring kerjasama, (3) pendelegasian penyelenggaraan pelatihan kepada unit-unit pelaksana pelatihan yang terakreditasi, dan (4) menyediakan dukungan terwujudnya *outcome* pelatihan berupa meningkatnya kinerja pengelolaan dan bisnis yang berbasis sumber daya kelautan dan perikanan, baik di dalam negeri maupun di kawasan ASEAN.

KONDISI KELEMBAGAAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERIKANAN

Sebagai salah satu unit kerja di lingkup Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPSDMKP), dalam rangka menjalankan tugas serta fungsi sebagai penyedia jasa pelatihan, Puslat KP dibantu 6 Unit Pelaksana Teknis Pelatihan, yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan di Medan (Sumatera Utara), Tegal (Jawa Tengah), Banyuwangi (Jawa Timur), Aertembaga (Sulawesi Utara), dan Ambon (Maluku),serta Balai Pendidikan dan Latihan Aparatur Sukamandi (Jawa Barat).

Cakupan geografi wilayah kerja dari setiap UPT tersebut adalah provinsi-provinsi di sekitarnya.

JUMLAH YANG DILATIH TAHUN 2014
SEBANYAK 18.014

PENANGKAPAN IKAN, PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN, AQUAKULTUR, GARAM, KONSERVASI PERAIARAN, KEWIRAUSAHAAN, KESELAMATAN DASAR KERJA DILAUT, MANAJEMEN



Wilayah kerja enam unit pelaksana teknis Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, BPSDM-KP

No.	Unit Kerja	Wilayah Kerja (Provinsi)	Keterangan
1	BPPP Medan	NAD, Sumut, Sumbar, Kepri, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka	8 provinsi, 123 kabupaten/kota
2	BPPP Tegal	Sumsel, Lampung, Banten, Jabar, DKI Jakarta, Jateng, DIY, Kalbar,	9 provinsi, 134 kabupaten/kota
3	BPPP Banyuwangi	Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan	5 provinsi, 91 kabupaten/kota
4	BPPP Aertembaga	Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Kaltim	6 provinsi, 75 kabupaten/kota
5	BPPP Ambon	Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara,	provinsi, 72 kabupaten/kota
6	BDA Sukamandi	Seluruh Provinsi di Indonesia	

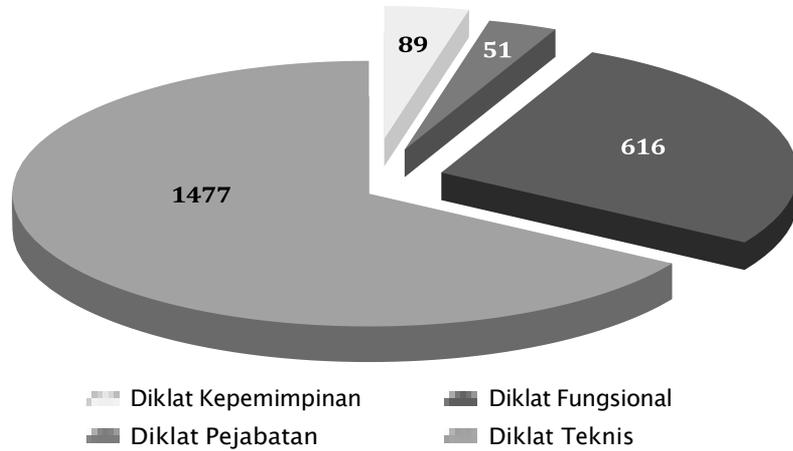
Total SDM yang dimiliki oleh Puslat KP dan Balai sebanyak 467 orang terdiri dari 334 orang pengelola diklat, 76 orang widyaiswara dan 57 orang instruktur yang kompeten dibidangnya.

Pengelola diklat berfungsi untuk mendukung terselenggaranya proses pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan di kampus maupun di lokasi peserta diklat. Jumlah tenaga kediklatan dimasing-masing satker pelatihan dapat dilihat pada table di bawah ini.

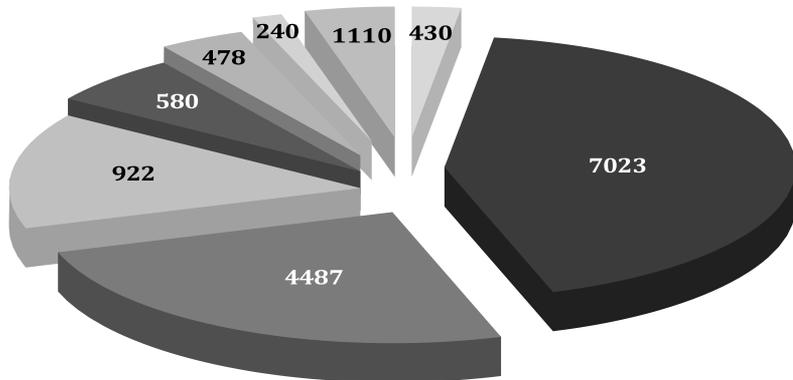
Jumlah tenaga kediklatan di Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan dan enam unit pelaksana teknis (5 BPP dan 1 BDA) .

No.	Satuan Kerja	Jabatan			Jumlah
		Pengelola Diklat	Widyaiswara	Instruktur	
1	Puslat KP	41	4	-	5
2	BPPP Medan	53	11	7	71
3	BPPP Tegal	60	17	18	95
4	BPPP Banyuwangi	55	18	15	88
5	BPPP Aertembaga	43	14	10	67
6	BPPP Ambon	40	4	7	51
7	BDA Sukamandi	42	8	-	50
Jumlah		334	76	57	467

DIKLAT BAGI APARATUR
TOTAL 2.744 ORANG
(101,5% DARI TARGET RKP)

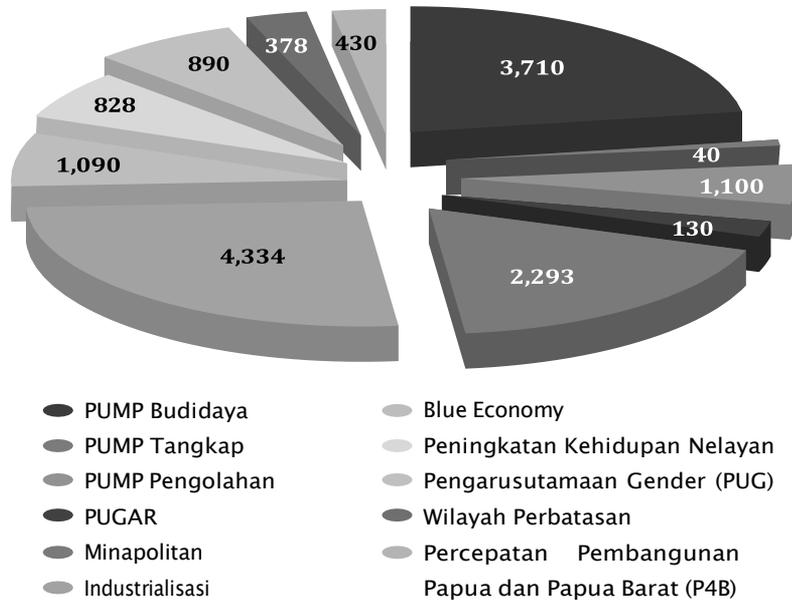


PELATIHAN BAGI MASYARAKAT
TOTAL 15.270 ORANG
(101,5% DARI TARGET RKP)



- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Budidaya Ikan | Kepelautan |
| Pengolahan Hasil Perikanan | Pergaraman |
| Penangkapan Ikan | Kewirausahaan/Manajemen |
| Permesinan Perikanan | Konservasi/Produk Non konsumsi |

DUKUNGAN PELATIHAN TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN KKP



Pada tahun 2013, target jumlah lulusan pelatihan yang sesuai dengan standar kompetensi adalah 13.900 orang, terdiri dari 12.000 orang masyarakat dan 1.900 aparatur.

Secara umum, sarana pelatihan yang tersedia di Balai masih dalam kondisi baik, namun dari segi jumlah belum

memenuhi standar rasio alat dengan jumlah peserta latih, selain itu dilihat dari segi pemanfaatannya, cukup banyak peralatan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi yang ada di masyarakat.

Lembaga
Sertifikasi Profesi
**Kelautan Dan
Perikanan**
(LSP-KP)



SERTIFIKASI UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING

LSP-KP didirikan dengan tujuan utama memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global melalui penguasaan kompetensi sebagai fokus pengembangan sumberdaya manusia bidang kelautan dan perikanan.

Tanpa dibarengi kualitas pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi, SDM KP kita sulit bersaing pada era globalisasi yang semakin ketat dan kompetitif. Sebaliknya, jika SDM telah sepenuhnya

siap, maka era globalisasi justru membuka lebih banyak peluang yang tidak lagi sebatas lingkungan nasional, tapi hingga internasional.

Langkah nyata untuk menjawab tuntutan perubahan tersebut adalah dengan mengidentifikasi Standar Kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja, penyusunan, dan pengoperasionalan dalam bentuk perangkat diklat bagi lembaga pendidikan dan pelatihan, serta

Lembaga Sertifikasi sebagai Materi Uji Kompetensi (MUK). Semua proses tersebut tentunya diawali proses kajian yang komprehensif dengan memperhatikan perkembangan teknologi dan kondisi sosial masyarakat.

Untuk memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global yang menempatkan penguasaan kompetensi sebagai fokus pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan SDM-KP bersama-sama dengan asosiasi industri dan profesi kelautan dan perikanan sejak tahun 2007 juga telah menginisiasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan (LSP-KP).

LSP-KP merupakan lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi di bidang kelautan dan perikanan yang mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). LSP-KP dibentuk dalam rangka mengoperasionalkan UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan, UU No. 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional, dan UU No 31/2004 jo UU No. 45/2009 tentang perikanan.

Pengembangan sistem sertifikasi profesi ditujukan untuk merespon kemajuan inovasi teknologi dan pertumbuhan spesialisasi profesi untuk memfasilitasi pasar kerja global.

PENGEMBANGAN SDM-KP BERBASIS KOMPETENSI

Pengembangan SDM-KP berbasis kompetensi dilakukan berdasarkan standar kompetensi kerja lembaga diklat dan sertifikasi kompetensi sebagai satu kesatuan yang utuh dan terintegrasi.

STANDAR KOMPETENSI KERJA

“Standar” adalah ukuran yang disepakati, sedangkan “Kompetensi Kerja” adalah kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap seseorang dalam menyelesaikan fungsi dan tugas atau pekerjaan sesuai persyaratan pekerjaan yang ditetapkan yang dapat yang dapat diobservasi.

Dengan demikian maka Standar Kompetensi Kerja dirumuskan sebagai kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/ atau sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada 3 (tiga) standar kompetensi kerja yang dikenal dalam dunia kerja yaitu : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK), Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), dan Standar Kompetensi Kerja Internasional.

Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) merupakan standar yang dibuat dan dikembangkan oleh industri/kementerian/asosiasi tertentu yang menetapkan standar-standar yang diperlukan untuk

melaksanakan pekerjaan/jabatan tertentu untuk memenuhi kebutuhan dilingkungan sendiri.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah standar yang dibuat dan dikembangkan oleh organisasi yang berkepentingan (industri, pemerintah, dan masyarakat) yang menggambarkan standar-standar yang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan/jabatan tertentu yang diberlakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Adapun Standar Kompetensi Kerja Internasional merupakan standar yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional yang menggambarkan standar-standar yang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan/jabatan tertentu yang digunakan secara internasional

PERMENAKERTRANS Nomor : PER. 08/MEN/2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), dinyatakan bahwa pembinaan, peningkatan dan pengembangan profesionalitas aparatur/tenaga kerja di Indonesia menuntut diperlukannya SKKNI terkait pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan.

Asosiasi profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan Lembaga Diklat Profesi bersama-sama dengan pengguna (Pemerintah, Pemerintah Daerah, Industri, dan Pelaku Usaha) sepakat mengacu pada SKKNI sebagai standar kompetensi

yang digunakan untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan, dan proses sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan program pembangunan kelautan dan perikanan.

SKKNI antara lain akan dipergunakan sebagai acuan untuk:

1. Menyusun uraian pekerjaan;
2. Menilai unjuk kerja;
3. Melakukan sertifikasi profesi;
4. Menyusun dan mengembangkan program Diklat dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan.

Dengan tersusunnya SKKNI sesuai standar yang telah ditetapkan maka :

1. Aparatur/tenaga kerja diharapkan mampu:
 - a) Merencanakan kegiatan sesuai jabatan/pekerjaan;
 - b) Melaksanakan kegiatan;
 - c) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
 - d) Mengembangkan pekerjaan.
2. Lembaga diklat profesi diharapkan mampu:
 - a) Menyelenggarakan program Diklat;
 - b) Mengembangkan program Diklat.
3. Lembaga sertifikasi profesi diharapkan mampu:
 - a) Menyusun Materi Uji Kompetensi
 - b) Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi;
 - c) Mengembangkan skema sertifikasi Kompetensi.

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja.

Berdasarkan PerPres Nomor 8 Tahun 2012 dinyatakan bahwa kualifikasi tenaga kerja di Indonesia ditetapkan 9 (sembilan) level yaitu dari jenjang jabatan terendah (kualifikasi I) sampai jenjang jabatan tertinggi (kualifikasi IX).

Kriteria penyusunan KKNI dijelaskan sebagai berikut:

1. Derajat kesulitan bidang keahlian atau pekerjaan yang diukur di mulai dari tugas-tugas yang mudah, yang sekedar pengulangan tanpa pertimbangan sampai yang teramat rumit, berubah, tidak terduga yang memerlukan pertimbangan.

2. Pengetahuan yang diperlukan dari sekedar hanya mengandalkan ingatan, sampai pada yang memerlukan analisis dan evaluasi.
3. Tanggung jawab yang diemban, dapat meliputi tanggung jawab pada orang lain dan juga atas jumlah serta kualitas hasil.
4. Penerapan pengetahuan untuk pelatihan kerja, pendidikan dan pekerjaan yang tinggi.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, dinyatakan bahwa :

1. Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus;
2. Program pelatihan kerja disusun mengacu pada jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
3. KKNI terdiri dari 9 jenjang yang dimulai dari jenjang satu terendah sampai sembilan tertinggi.

KKNI meliputi tiga parameter, yaitu kegiatan, pengetahuan dan tanggung jawab sebagai berikut :

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

KUALIFI KASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
I	Melaksanakan kegiatan : 1. Lingkup terbatas 2. Berulang dan sudah biasa 3. Dalam konteks yang terbatas	1. Mengungkap kembali 2. Menggunakan pengetahuan yang terbatas 3. Tidak memerlukan gagasan baru	1. Terhadap kegiatan sesuai arahan 2. Di bawah pengawasan langsung 3. Tidak ada tanggungjawab terhadap pekerjaan orang lain
II	Melaksanakan kegiatan : 1. Lingkup agak luas 2. Mapan dan sudah biasa 3. Dengan pilihan-pilihan yang terbatas terhadap sejumlah tanggapan rutin	1. Menggunakan pengetahuan dasar operasional 2. Memanfaatkan informasi yang tersedia 3. Menerapkan pemecahan masalah yang sudah baku 4. Memerlukan sedikit gagasan baru	1. Terhadap kegiatan sesuai arahan 2. Di bawah pengawasan tidak langsung dan pengendalian mutu 3. Punya tanggungjawab terbatas terhadap kuantitas dan mutu 4. Dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain
III	Melaksanakan kegiatan : 1. Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan yang sudah baku 2. Dengan pilihan-pilihan terhadap sejumlah prosedur 3. Dalam sejumlah konteks yang sudah biasa	1. Menggunakan pengetahuan-pengetahuan teoritis yang relevan 2. Menginterpretasi informasi yang tersedia 3. Menggunakan perhitungan dan pertimbangan 4. Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang sudah baku	1. Terhadap kegiatan sesuai arahan dengan otonomi terbatas 2. Di bawah pengawasan tidak langsung dan pemeriksaan mutu 3. Bertanggungjawab secara memadai terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja 4. Dapat diberi tanggung jawab terhadap hasil kerja orang lain

KUALIFI KASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
IV	<p>Melakukan kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis 2. Dengan pilihan-pilihan yang banyak terhadap sejumlah prosedur 3. Dalam berbagai konteks yang sudah biasa maupun yang tidak biasa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan basis pengetahuan yang luas dengan mengaitkan sejumlah konsep teoritis 2. Membuat interpretasi analisis terhadap data yang tersedia 3. Pengambilan keputusan berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku 4. Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang bersifat inovatif terhadap masalah-masalah yang konkrit dan kadang-kadang tidak biasa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhadap kegiatan yang direncanakan sendiri 2. Dibawah bimbingan dan evaluasi yang luas 3. Bertanggungjawab penuh terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja 4. Dapat diberi tanggung jawab terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain
V	<p>Melakukan kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis khusus (spesialisasi) 2. Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku 3. Yang memerlukan banyak pilihan prosedur standar maupun non standar 4. Dalam konteks rutin maupun tidak rutin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan basis pengetahuan yang luas dengan pendalaman yang cukup di beberapa area 2. Membuat interpretasi analitik terhadap sejumlah data yang tersedia yang memiliki cakupan luas 3. Menentukan metoda-metoda dan prosedur yang tepat guna, dalam pemecahan sejumlah masalah yang konkrit yang mengandung unsur-unsur 	<p>Melakukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang diarahkan sendiri dan kadang-kadang memberikan arahan kepada orang lain 2. Dengan pedoman atau fungsi umum yang luas 3. Kegiatan yang memerlukan tanggungjawab penuh baik sifat, jumlah maupun mutu dari hasil kerja 4. Dapat diberi tanggung jawab terhadap pencapaian hasil kerja
V	<p>Melakukan kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam lingkup yang sangat luas dan memerlukan penalaran teoritis khusus 2. Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur baku serta kombinasi prosedur yang tidak baku 3. Dalam konteks rutin dan tidak rutin yang berubah-ubah sangat tajam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan basis pengetahuan khusus yang mendalam pada beberapa bidang 2. Melakukan analisis, memformat ulang dan mengevaluasi informasi-informasi yang cakupannya luas 3. Merumuskan langkah-langkah pemecahan yang tepat, baik untuk masalah yang konkrit maupun abstrak 	<p>Melaksanakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan kegiatan/ proses kegiatan 2. Dengan parameter yang luas untuk kegiatan yang sudah tertentu 3. Kegiatan dengan penuh akuntabilitas untuk menentukan tercapainya hasil kerja pribadi dan atau kelompok 4. Dapat diberi tanggung jawab terhadap pencapaian hasil kerja organisasi

KUALIFI KASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
VII	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan orang untuk : 1. Menjelaskan secara sistematis dan koheren atas prinsip-prinsip utama dari suatu bidang, dan 2. Melaksanakan kajian, penelitian dan kegiatan intelektual secara mandiri di suatu bidang, menunjukkan kemandirian intelektual serta analisis yang tajam dan komunikasi yang baik		
VIII	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan orang untuk : 1. Menunjukkan penguasaan suatu bidang, dan 2. Merencanakan dan melaksanakan proyek penelitian dan kegiatan intelektual seraya original berdasarkan standar-standar yang diakui secara internasional		
IX	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan orang untuk : 1. Menyumbangkan pengetahuan original melalui penelitian dan kegiatan intelektual yang dinilai oleh ahli independen berdasarkan standar internasional		

LEMBAGA DIKLAT

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 09 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kelautan dan Perikanan, dinyatakan bahwa fungsi lembaga diklat adalah : meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang relevan dengan tugas pekerjaan/jabatan sesuai standar.

Lembaga diklat menggunakan standar kompetensi kerja sebagai acuan dalam program diklat yang diturunkan dalam bentuk kurikulum diklat dan bahan ajarnya.

pengakuan secara formal terhadap kompetensi kerja yang dikuasai oleh aparatur atau tenaga kerja di bidang kelautan dan perikanan yang ditempuh melalui uji kompetensi sesuai standar yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

SERTIFIKASI KOMPETENSI

Sertifikasi kompetensi bidang kelautan dan perikanan merupakan bentuk

PERAN DAN DAMPAK SERTIFIKASI

Peran sertifikasi kompetensi dapat ditinjau dari 3 (tiga) sisi yaitu peran bagi pemegang sertifikat, dunia industri, dan lembaga diklat/KKP yang selengkapny dijelaskan sebagai sebagai berikut :

Bagi Pemegang Sertifikasi.

- Meningkatkan mobilitas dan daya saing.
- Meningkatkan rekognisi dan remunerasi.
- Meningkatkan prospek karir.
- Meningkatkan keselamatan kerja.
- Meningkatkan kepercayaan diri dan kebanggaan-kredibilitas.

Bagi Dunia Industri.

- Memudahkan rekrutmen dan seleksi .
- Memudahkan penempatan dan penugasan.
- Memudahkan pengaturan remunerasi.
- Memudahkan pengaturan pengembangan karier dan diklat .

- Meningkatkan produktivitas.
- Meningkatkan keselamatan kerja.

Bagi Lembaga Diklat/KKP.

- Kebijakan standarisasi sistem remunerasi dan rekognisi.
- Kebijakan pengembangan SDM-KP berbasis kompetensi .
- Kebijakan tentang perlindungan tenaga kerja KP.
- Kebijakan tentang hubungan kerja antara dunia industri dan tenaga kerja KP.

Adapun dampak pengakuan sertifikasi adalah adanya perbedaan gaji, serta jaminan penempatan sesuai keahlian dan level jabatannya.

NILAI TAMBAH SERTIFIKASI KOMPETENSI

Wirausaha muda merupakan purnawidya pelatihan pemegang sertifikat tahun 2013 yang telah terjun dalam dunia usaha perikanan. Pemegang Sertifikat Kompetensinya saat ini sebanyak 9.099 orang.

Outcome alumni pemegang sertifikat kompetensi bergerak di 2 (dua) katagori pekerjaan yaitu : pekerja di dunia industri perikanan sebanyak 71,2 % dan wirausaha muda perikanan sebanyak 28,8% atau sekitar 2.565 orang.

KINERJA LSP-KP

Sejak mendapatkan lisensi dari BNSP, sampai dengan semester I tahun 2014, LSP-KP yang didukung 438 asesor kompetensi, 2 master asesor sebanyak, 3 asesor lisensi, dan 3 lead asesor telah menerbitkan 9.099 sertifikat. Disamping itu juga telah terbangun sistem sertifikasi di 31 lokasi Tempat Uji Kompetensi, (TUK) serta telah tersusun 14 judul Standar Kompetensi Kerja.

PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

Total sertifikat kompetensi yang telah diterbitkan sampai dengan semester I tahun 2014 sebanyak 9.099 sertifikat dengan perincian :

a. Bidang penangkapan Ikan	= 4.320 sertifikat.
b. Bidang Mesin Kapal Ikan	= 625 sertifikat.
c. Bidang Budidaya Perikanan	= 3.080 sertifikat.
d. Bidang Pengolahan Hasil	= 754 sertifikat.
e. Bidang Penyuluhan Perikanan	= 220 sertifikat.

ASESOR KOMPETENSI, MASTER ASESOR, ASESOR LISENSI, DAN LEAD ASESOR

A. Asesor Kompetensi.

Asesor Kompetensi adalah orang yang mempunyai kompetensi dan mendapatkan penugasan resmi untuk melakukan dan memberikan penilaian dalam uji kompetensi yang memerlukan pertimbangan atau pembenaran secara profesional. Seorang dinyatakan sebagai asesor kompetensi setelah lulus diklat 40 jam pelatihan dengan pelatih Master Asesor BNSP. Jumlah asesor kompetensi sebanyak 438 orang yang bertugas di berbagai lokasi Tempat Uji Kompetensi.

B. Master Asesor .

Master Asesor adalah orang yang telah memiliki lisensi asesor kompetensi, telah menguji sebanyak minimal 20 kali, ditambah diklat 80 jam pelatihan serta bertugas melatih pada diklat asesor kompetensi. Saat ini LSP-KP memiliki Master Asesor sebanyak 2 orang.

C. Asesor Lisensi.

Asesor Lisensi adalah orang yang telah lulus diklat 40 jam pelatihan, bertugas memverifikasi dan mensurveilan Tempat Uji

Kompetensi. Saat ini LSP-KP memiliki Asesor Lisensi sebanyak 4 orang.

D. Lead Asesor.

Lead Asesor adalah orang yang telah memiliki lisensi asesor kompetensi, telah menguji sebanyak minimal 20 kali, ditambah diklat 80 jam pelatihan, bertugas sebagai koordinator uji kompetensi dan sebagai penguji pada diklat asesor kompetensi. Saat ini LSP-KP memiliki Lead Asesor sebanyak 3 orang .

TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK)

Tempat Uji Kompetensi adalah tempat kerja profesi atau tempat yang memiliki sarana dan prasarana dengan kriteria setara dengan tempat kerja profesi yang diverifikasi oleh LSP-KP untuk menjadi tempat uji kompetensi.

LSP-KP telah memverifikasi dan menetapkan 31 lokasi TUK yang terdiri dari : Industri KP, Satuan Pendidikan SUPM, Perguruan Tinggi, Balai Pelatihan, dan Unit Kerja KKP lainnya.

STANDAR KOMPETENSI KERJA

Standar Kompetensi Kerja digunakan oleh LSP-KP sebagai dasar penyusunan Materi Uji Kompetensi (MUK), bekerjasama dengan berbagai institusi saat ini telah tersusun berupa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebanyak 14 judul, dengan ruang lingkup bidang penangkapan ikan, mesin kapal perikanan, budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan, dan penyuluhan perikanan.

PENGEMBANGAN LSP-KP

Dimasa yang akan datang pengembangan LSP-KP akan diarahkan pada 4 program kerja yaitu :

- A. Program penataan kelembagaan
- B. Program penguatan standarisasi
- C. Program pelaksanaan sertifikasi
- D. Program penataan manajemen mutu

DATA JUMLAH PESERTA LATIH
YANG DISERTIFIKASI
PER BIDANG KOMPETENSI

Tahun 2014 = 1.910
Total Sertifikat = 11.080

CAPAIAN KINERJA

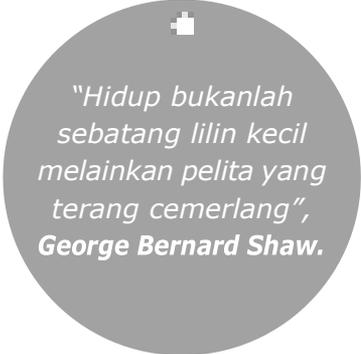
TAHUN 2009 - 2014

NO	KEGIATAN		TAHUN						JUMLAH
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1.	Sertifikasi Kompetensi	Sertifikat	19	215	1.516	2.627	4.793	1.910	11.080
2.	Perangkat Asesmen	Materi Uji Kompetensi	33	27	41	55	43	16	215
3.	Asesor	Orang	31	40	63	25	123	129	411
4.	Kompetensi Tempat Uji Kompetensi (TUK)	TUK	6	5	9	3	4	5	33
5.	SKKNI/SK3 Bidang KP	Paket	6	4	-	-	3	1	14

Kemitraan
Untuk
Pengembangan
Pelatihan



Puslat meningkatkan sinergitas program melalui kerjasama dengan berbagai institusi baik di dalam maupun di luar negeri. Kerjasamanya meliputi : pelatihan dalam aspek peningkatan materi pelatihan, peningkatan kapasitas tenaga pelatih dan pengembangan sarana prasarana pelatihan maupun pembiayaan.



*"Hidup bukanlah sebatang lilin kecil melainkan pelita yang terang cemerlang",
George Bernard Shaw.*

KERJASAMA DALAM NEGERI

A. Pengembangan *Coorporate Social Responsibility* (CSR) dengan berbagai perusahaan swasta dan BUMN seperti : BP Tangguh, Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Newmont Sulawesi. CSR sebagai bentuk tanggungjawab sosial bagi masyarakat yang berada diwilayah dan terkena dampak operasional perusahaan.

B. Pengembangan Kerjasama Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Program yang bersifat nasional ini berupa pengelolaan dana bergulir untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

C. Kerjasama dengan LSM /NGO di bidang konservasi seperti *The Nature Conservation* (TNC), *Conservation Indonesia* (CI) dan *Coral Triangel Center*

(CTC) dan CTSP. Kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain :

1. Penyusunan kurikulum dan modul pelatihan di bidang konservasi.
2. Pelatihan pengelolaan kawasan konservasi (MPA 101).
3. Penyusunan Renstra Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.
4. Kerjasama tenaga ahli (*silver expert*) dari Jepang (JICA). Proses seleksi dan penentuan calon tenaga expert sudah selesai dilaksanakan oleh JICA. Direncanakan silver expert tersebut akan ditempatkan di Tegal untuk mendukung peningkatan kapasitas SDM di BPPP Tegal dan SUPM Tegal.

D. Kerjasama dengan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana

Penyuluhan Daerah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur berupa pelatihan bagi Penyuluh Perikanan di Kabupaten Nunukan.

E. Kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penyusunan dan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). SKKNI yang sudah disusun dengan inisiasi dari Puslat KP adalah SKKNI budidaya catfish.

F. Kerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan (LSP-KP) dalam kegiatan sertifikasi kompetensi dan pembinaan Tempat Uji Kompetensi (TUK). Terdapat 12 (dua belas) TUK yang sudah diverifikasi BNSP/LSP-KP yang berada di lingkungan UPT

BPSDMKP.

G. Kerjasama pembinaan penyelenggaraan permagangan di bidang kelautan dan perikanan dengan ASTUIN, Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI) dan PT Pudji Utami, dalam kegiatan permagangan ke Jepang.

H. Kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Nasional dalam penyelenggaraan pelatihan bagi korban bencana Merapi di Kabupaten Sleman berupa pelatihan pengolahan hasil perikanan dan budidaya perikanan.

I. Kerjasama dengan PT Garam, dalam pengembangan modul dan kurikulum pelatihan garam.

J. Kerjasama antara UPT Pelatihan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota yang berada di wilayah binaan UPT Pelatihan. Kegiatan kerjasama meliputi penyelenggaraan pelatihan, pemanfaatan sarana dan prasarana pelatihan serta tenaga pelatih.



KERJASAMA LUAR NEGERI

Pengembangan kerjasama luar negeri yang telah dilaksanakan Puslat KP meliputi :

A. Pelatihan dengan peserta Luar Negeri dengan profil kegiatan pelatihan sebagai berikut :

1) Jenis Pelatihan.

Pelatihan yang banyak diminati Negara-negara Asia Afrika adalah pelatihan di bidang budidaya perikanan dan penangkapan seperti : *International Training Program on Intensive Shrimp Culture for Asian Countries* (10 hari); *International Training Program for Asia and Africa Countries on Grouper Nursery* (10 hari) ; *International Training Program on Fishing Technology and Navigation for Pacific Countries* (10 hari). Kerjasama pelatihan yang pernah dilaksanakan dengan Malaysia adalah *Navigation and Fishing Technology Training Course* (30 hari); *Engineering, Refrigeration and Machineries Training Course* (30 hari);

Hatchery Grouper Training Course (20 hari).

2) Tempat Penyelenggaraan Pelatihan.

Pelatihan budidaya dilaksanakan di Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau Jepara (BBPBAP) Jepara Jawa Tengah; Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar Sukabumi (BBPBAT), BBAP Situbondo, Jawa Timur dan BBL Batam. Sedangkan pelatihan penangkapan ikan di Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan Semarang (BBPPI). Untuk pelatihan navigasi *Engineering, Refrigeration* dan *Machineries* pelaksanaan pelatihan di BPPP Tegal, STP Jakarta dan PT Harini Asri Bahari.

3) Peserta Pelatihan.

Peserta pelatihan Asia Afrika berasal dari Bangladesh, Cambodia, Laos, Maldives, Myanmar, Pakistan, Sri Lanka, Timor Leste. Kenya, Tanzania, Afrika Selatan, Tonga, Vanuatu, Fiji, Tonga, Solomon Islands, Timor Leste dan Papua Nugini.



B. Kerjasama di bidang konservasi perairan dengan USAID, NOAA dan IMACS. Kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1) Kerjasama dengan NOAA dalam penyusunan kurikulum dan modul pelatihan serta penyelenggaraan pelatihan MPA 101.

Kerjasama USAID, NOAA dan IMACS dengan BPSDM-KP meliputi penyusunan modul dan pelatihan bidang dampak perubahan iklim (dengan melibatkan penyuluh perikanan), pelatihan melawan praktek illegal fishing (dengan melibatkan peneliti), konservasi kelautan (dengan membuat standar kompetensi kerja khusus), dan pendidikan kelautan dan perikanan (dengan membuat kurikulum dan modul).

Terdapat empat hal proses kerjasama yang dapat disinergikan, yaitu pengembangan kapasitas yang berkaitan dengan konservasi (terdapat 2.544 calon pengelola kawasan konservasi di 16 pelatihan pada tahun 2010-2012), pengembangan modul kurikulum bidang konservasi disesuaikan dengan karakteristik SDM lokal, sinergi pengembangan regulasi standar kompetensi di bidang kawasan konservasi perairan, dan evaluasi kerjasama yang telah berjalan selama ini dilihat dari peserta pelatihannya, baik sebagai calon pelatih (peserta *Training of Trainer*) maupun pengelola kawasan perairan.

Kerjasama tersebut berpeluang meningkatkan kompetensi SDM kelautan dan perikanan unggulan di tingkat dunia, adanya *knowledge management* yang dikaitkan dengan kerjasama Selatan-Selatan dan *Cooperation Tringular* serta adanya program pelatihan bagi widyaiswara, guru, dan dosen di bidang konservasi.

C. Kerjasama Pelatihan dengan Pihak Luar Negeri. Sejumlah kerjasama pelatihan telah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan pihak luar negeri antara lain sebagai berikut:

1. Pelatihan Nilai Mutu Hasil Perikanan. Pelatihan ini dilaksanakan oleh KKP bekerjasama dengan Pemerintah Belanda melalui kegiatan *Value Capture Fisheries* (Valcapfish).

Kegiatan ini melibatkan tiga unit kerja eselon I lingkup KKP, yaitu Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen P2HP dan BPSDM-KP. Melalui kegiatan ini para peserta yang terdiri dari manajer pelabuhan, inspektur mutu dan dosen perikanan bersama narasumber dari Indonesia dan Belanda melaksanakan proses ToT serta mempersiapkan modul bagi pengelolaan ikan yang baik sejak proses penangkapan ikan di laut, proses penyimpanan di palka menuju darat, proses pendaratan di pelabuhan hingga proses pengolahan hasil. Peserta pelatihan kemudian menjadi pelatih bagi pelaku usaha perikanan yang dilaksanakan di 6 pelabuhan perikanan terpilih, yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta, PPS Bitung,

- pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Rakyat China. Kerjasama ini telah dirintis sejak tahun 2007, dengan bentuk pengiriman sekitar 5-8 orang aparatur KKP untuk mengikuti pelatihan atau seminar setiap tahun di China.
5. Kerjasama pelaksanaan pelatihan perikanan bagi negara sahabat. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri RI dan diikuti oleh peserta dari negara Asia Pasifik. Pelatihan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain bertujuan meningkatkan kemampuan teknis perikanan SDM negara sahabat, kegiatan ini juga untuk memperkuat posisi diplomatik Indonesia. Dari tahun 2008 hingga 2010 telah dilaksanakan 8 angkatan pelatihan dengan peserta masing-masing pelatihan sebanyak 10 orang yang berasal dari Afganistan, Bangladesh, Kenya, Malaysia, Mozambique, Papua Nugini, Sudan, Tanzania, Timor Leste, Uluwatu dan Yaman.
 6. Program penempatan tenaga ahli perikanan dan pertukaran mahasiswa. Program ini dilakukan dengan penempatan mahasiswa Pukyong National University Busan Korea Selatan di unit pendidikan perikanan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan KOICA Korea Selatan.
 7. Dukungan pelaksanaan Coral Triangle Initiative melalui pelatihan *Marine Protected Area* bersinergi dengan NOAA Amerika yang dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan (PUSLAT) Kelautan dan Perikanan.
 8. Penugasan aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai narasumber pada pelatihan manajemen perikanan yang diselenggarakan oleh *Departement of Fisheries Malaysia*.
 9. Penugasan aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan pada pelatihan manajemen perikanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Mesir.
 10. Pengembangan kapasitas aparatur melalui pendidikan S2 dan S3 di Australia dengan biaya beasiswa dari AusAID, yang dilanjutkan dengan pendampingan implementasi pasca pendidikan melalui kegiatan *Professional Development Activity* yang dilaksanakan oleh Kedutaan Besar Australia di Indonesia.
 11. Timor Leste studi banding pendidikan kelautan dan perikanan di Indonesia. Tim Delegasi Timor Leste melakukan kunjungan dan audiensi di kantor BPSDM-KP. Tim Delegasi Timor Leste terdiri dari Wakil Menteri Pendidikan, Marcal Avelino Ximenes; Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Abrao Dos Santos; Atase Perdagangan, Adelino Fernandes serta 3 delegasi lainnya. Timor Leste ingin membangun sekolah kelautan dan perikanan seperti yang ada di Indonesia.

KERJASAMA SELATAN-SELATAN

Indonesia terus meningkatkan perannya dalam kancah pembangunan ekonomi masyarakat dunia. Sebagai dukungan terhadap *South South Cooperation* (Kerjasama Selatan-Selatan), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan pelatihan internasional bagi negara-negara sahabat.

Pelatihan ini merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam pembentukan keseimbangan

pembangunan ekonomi dengan memperkuat dan meningkatkan hubungan ekonomi negara-negara berkembang yang menjadi tujuan dari Kerja Sama Selatan-Selatan.

Terkait tujuan tersebut, dalam lima tahun terakhir, Kemlu dan KKP telah menyelenggarakan 11 pelatihan internasional bagi SDM kelautan dan perikanan yang diikuti 200 peserta dari 26 negara. Ruang lingkup pelatihannya terus dikembangkandari bidang penangkapan



ikan dan budidaya, penanganan ikan pasca panen hingga pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Pengembangan dan pemilihan jenis pelatihan dilandasi komitmen Indonesia dan negara sahabat di kawasan regional untuk meningkatkan pengembangan pengelolaan kawasan konservasi perairan. Hal ini tidak lepas dari posisi Indonesia yang mempelopori : *The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* (CTI-CFF). Kerjasama CTI-CFF yang sudah

dimulai sejak tahun 2007 tersebut telah diikuti 6 negara yakni Indonesia, Malaysia, Papua New Gueinea, Philipina, Kepulauan Solomon dan Timor Leste.

Jenis pelatihan yang dilakukan mengukung konsep *blue economy*, selaras dengankomitmen yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhyono pada *Rio 20 Summit Sidelines* di Brazil Tahun 2012.

Konsep *blue economy* merupakan konsep pembangunan berbasis

sumberdaya kelautan dan perikanan yang dilandasi prinsip keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan, efisiensi alam, tidak merusak lingkungan, meningkatkan pendapatan dan perluasan lapangan pekerjaan melalui pengembangan usaha dan investasi yang inovatif dan kreatif. Indonesia berkomitmen untuk membangun wilayah laut dan pesisirnya berdasarkan konsep *blue economy*.

Indonesia juga memiliki komitmen yang sangat besar terhadap konservasi perairan. Salah satu targetnya adalah

menjadikan luas kawasan konservasi perairan menjadi 20 juta hektar di tahun 2020. Target ini sangat realistis mengingat di tahun 2012 saja luas kawasan konservasi perairan Indonesia telah mencapai 15,78 juta hektar.

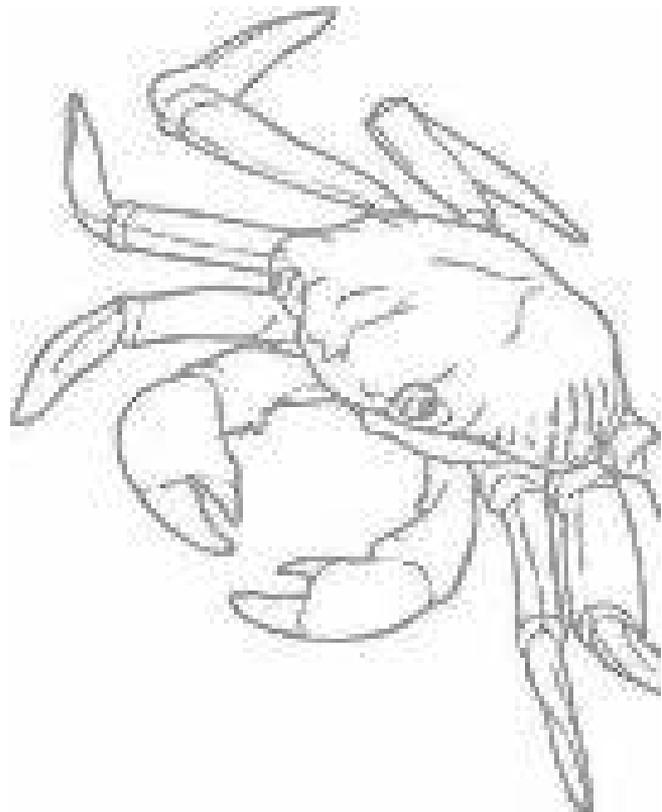
Untuk mencapai target tersebut pada tahun 2014 diperlukan lebih dari 2.544 pengelola kawasan konservasi perairan, yang terdiri dari : *SDM Managerial Level, Middle Level, dan Ranger Level*. Untuk memenuhinya BPSDM KP telah menyelenggarakan serangkaian kegiatan pelatihan seperti : MPA 101, EAFM, GIS,

Tourism Guidance, Public Consultation, selama tiga tahun terakhir dengan jumlah peserta mencapai jumlah 981 orang. KKP juga telah menyusun standar kompetensi khusus yang akan dipergunakan sebagai referensi pengembangan kawasan konservasi perairan di kawasan regional.

Pelatihan dapat menjadi forum penting untuk saling bertukar ide antara Indonesia dengan peserta lain dari negara-negara sahabat. Terkait hal tersebut juga telah dilakukan pelatihan-pelatihan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Tegal yang diikuti 10 peserta dari kawasan Asia Pasific (Papua Nugini, Fiji, Kiribati, dan Timor Leste) serta 3 orang dari Indonesia (Sorong, Papua Barat). Materi pelatihannya adalah kombinasi materi MPA 101 dan *MPA Planning Management* milik *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA) sebanyak 70 jam pembelajaran.

Selain itu juga telah dilakukan *field trip* di kawasan *Silvofisheries* Tegalsari. Field trip tersebut merupakan praktek penyemaian dan penanaman bakau serta budidaya kepiting soka yang dilanjutkan dengan kunjungan ke pusat kerajinan Tegal. Fasilitator pelatihan berasal dari Institut Pertanian Bogor (IPB), *Conservation Indonesia*, *The Nature Conservancy* dan BPPP Tegal. Narasumbernya dari P2MKP Bakau Mulya dan P2MKP Griya Karya Tiara Kusuma.

Materi yang diberikan pada program pelatihan internasional *Marine Protected Area Management Planning* adalah sebagai berikut: (1) *Introduction*, (2) *Marine ecosystem*, (3) *MPA and education*, (4) *MPA and low enforcement*, (5) *MPA and fisheries*, (6) *MPA and tourism*, (7) *MPA management policy*, (8) *Pre planning*, (9) *Initial assessment*, (10) *Post initial assessment*, (11) *Planning preparation*, (12) *Filed trip*, (13) *Monitoring and evaluation plan*, (14) *Implementation design*.



KERJASAMA PELATIHAN DENGAN *STAKEHOLDER*

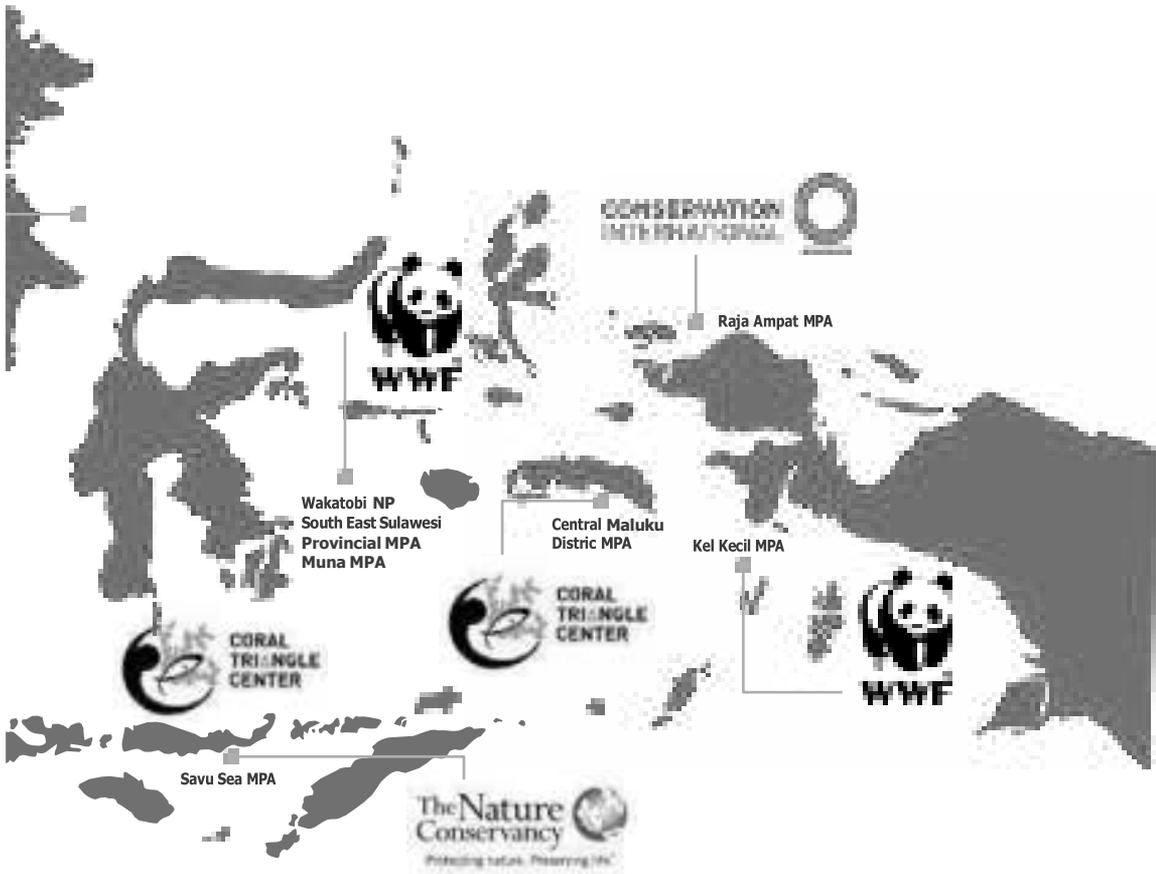
Kerjasama pelatihan yang telah dilakukan dengan para stakeholder, antara lain :

1. Kerjasama sarana prasarana perikanan dengan pihak swasta perikanan telah dilaksanakan oleh UPT di lingkup BPSDM-KP. Kerjasama tersebut memungkinkan siswa berlatih dengan menggunakan peralatan yang dimiliki pihak swasta.
2. Kerjasama pendampingan sertifikasi *Basic Safety Training* (BST) oleh Kementerian Perhubungan selaku IMO authority di Indonesia. UPT Pelatihan yang menyelenggarakan BST antara lain : STP Jakarta, AP Bitung, SUPM Negeri Pariaman dan BPPP Tegal.
3. Sinergi dengan perusahaan BUMN atau swasta dilakukan melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kerjasama ini telah dilakukan dengan British Petroleum (BP) untuk pelatihan perikanan di Teluk Bintuni, PT Pertamina (Persero), PT Tirta Investama (Aqua-Danone), PT Newmont Nusa Tenggara, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Jabar Banten, Bank BNI, PT Puji Utamo, Kawasan Berikat Jakarta, PT Harini dan lain-lain.
4. Kerjasama peningkatan SDM masyarakat pesisir dengan Pemerintah Daerah, antara lain di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
5. Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud yang dilakukan di BPPP Aertembaga.
6. Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk

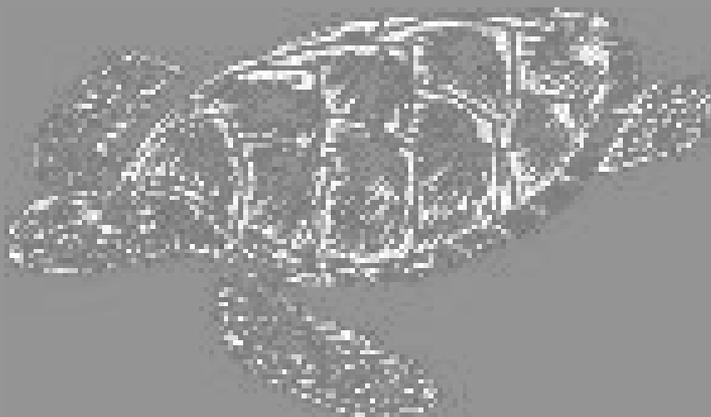
- meningkatkan kemampuan nelayan dalam pembuatan Hand Line Tuna.
7. Kerjasama pelatihan dengan Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk mengembangkan budidaya udang windu.
 8. Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan untuk meningkatkan budidaya udang windu.
 9. Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bentaeng untuk mengembangkan produksi pengolahan rumput laut pasca panen.
 10. Kerjasama pelatihan dilakukan dengan NGO, LSM, dan income pelatihan diperoleh dari CTC, TNC, IMACS, NOAA, IMPAG, WWF, WCS, CI, dan lain-lain.
 11. BPSDM-KP menggelar Pelatihan Budidaya Perikanan dan Pengolahan Hasil Perikanan bagi Bintara Pembina Desa (Babinsa), Persit Kartika Chandra Kirana KODAM VII Wirabuana, Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban (Babinkamtib), Kelompok Tani, mahasiswa UNHAS di Sulawesi Selatan. Pelatihan ini merupakan wujud nyata sinergitas antara KKP dan TNI AD guna menyukseskan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

PETA SEBARAN NGO KONSERVASI YANG BEKERJASAMA DENGAN BPSDMKP





Menggulirkan
Semangat
Kewirausahaan Sosial
Melalui P2MKP



Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) merupakan lembaga pelatihan di bidang kelautan dan perikanan yang dibangun, dimiliki dan dikelola oleh masyarakat baik perorangan maupun kelompok. P2MKP membantu Puslat melakukan pelatihan guna menciptakan tenaga kerja dan wirausaha baru, sekaligus mengawal para wirausaha baru hasil pelatihan BP3 dan P2MKP dalam menjalankan bisnisnya.



"Bisnis harus dijalankan dengan tujuan mendapatkan untung, karena kalau tidak, ia akan mati. Tapi jika ada yang mencoba menjalankan bisnis semata-mata demi mengejar keuntungan, maka saat itulah bisnis harus mati, karena tidak ada alasan baginya untuk hadir",
Hendry Ford.

Pendirian P2MKP pada awalnya merupakan salah satu strategi Puslat KP untuk meningkatkan kapasitas layanan pelatihan dengan cara membangun kekuatan lokal yang bertumpu pada kompetensi berbasis pengalaman usaha para pelakunya. Melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara swadaya, P2MKP telah mencontohkan semangat dan gerakan kewirausahaan sosial yang layak diteladani dan diapresiasi.

Berikut diuraikan secara rinci tujuan pendirian kelompok wirausaha mandiri kelautan dan perikanan yang kiprahnya kini tak hanya dikenal di Indonesia, tapi juga hingga luar negeri, seperti : Fiji dan Timor Leste.

Tujuan pendirian P2MKP :

1. Sebagai Lembaga Pelatihan (*training institution*) unggulan yang mendapatkan akreditasi secara nasional dan internasional karena didukung sumber daya manusia/ pelatih kompeten, sarana dan prasarana memadai, kurikulum berbasis kompetensi berstandar nasional dan internasional serta dukungan jejaring luas yang mampu meningkatkan volume dan mutu layanan pelatihan bagi masyarakat kelautan dan perikanan.
2. Pusat rujukan (*reference institution*) dan pusat informasi (*information center*) pemanfaatan IPTEK kelautan dan perikanan.
3. Pusat pengembangan (*development center*) layanan pelatihan kelautan dan perikanan berbasis pelatihan dan perikanan untuk pelatih (*Training of Trainers*).
Peran P2MKP sebagai satuan penyelenggara pelatihan kelautan dan perikanan yang berbasis pada unit-unit usaha produktif sangat dibutuhkan untuk mengefisienkan dan mengefektifkan penyelenggaraan pelatihan di kawasan minapolitan sebanyak 47.000 orang/ tahun, meningkatkan pencapaian target pelatihan KKP dengan target latih di P2MKP serta tempat pelatihan dan pembinaan kewirausahaan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan.

Pelatihan yang diselenggarakan berbasis komoditas bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan atau teknisi permesinan perikanan. Sedangkan jenis pelatihan yang dikembangkan antara lain : budidaya ikan lele, patin, gurami serta pengolahan rumput laut dan lain-lain.

Hal yang sangat mengembirakan dan patut dicatat bahwa jumlah P2MKP terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 jumlahnya tercatat sebanyak 154 unit, dan ditahun 2013 naik sangat signifikan menjadi 387 dengan peserta latih mencapai 4.800 orang.

STANDARISASI PELATIHAN

Untuk menjadikan P2MKP sebagai suatu pusat pelatihan mandiri yang kompeten dan dapat diandalkan, dimasa yang akan datang perlu dilakukan standarisasi pelatihan. Tujuannya adalah untuk memperoleh hasil pelatihan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan pada semua tingkatan pelaksana.

Standarisasi yang dimaksud akan memuat kaidah, aturan, norma dan etika yang mengikat untuk diikuti oleh semua pihak, baik lembaga pemerintah maupun swasta perorangan sebagai pengguna standar tersebut.

PROSES PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN

Proses pembentukan, pengelolaan dan pengawasan terhadap P2MKP perlu dilakukan agar keberadaannya dapat dikelola lebih baik melalui peningkatan sarana, prasarana dan SDM, pelatihan yang terstandar, perluasan jejaring dan legalitas formal yang memadai, sehingga status dan perannya semakin diakui dan dirasakan masyarakat dan lingkungannya.

Pembentukan, pengelolaan dan pengembangan P2MKP diawali proses identifikasi, registrasi dan penetapan, klasifikasi, pembinaan, pembentukan Forum Komunikasi (Forkom P2MKP), monitoring, evaluasi dan pelaporan secara terencana, tersistem, terpadu dan berkesinambungan oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik

pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota) maupun masyarakat.

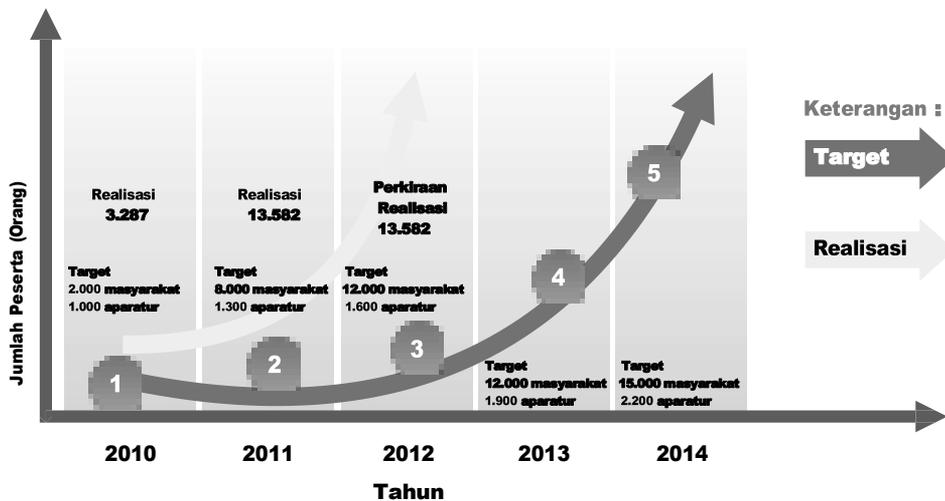
Melalui prosedur dan sistem yang semakin komprehensif serta dilakukan secara serempak dan sistematis, diperkirakan animo calon P2MKP lebih banyak karena unit produksi bidang kelautan dan perikanan sangat beragam jenisnya. Melihat kemajuan yang ditunjukkan selama beberapa tahun keberadaannya, sudah saatnya P2MKP diberikan pembinaan secara terencana, tersistem, terpadu serta berkesinambungan.

Hingga saat ini sudah ada 387 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Proses akreditasi institusi ini sedang dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan.

PENETAPAN KINERJA

Sasaran strategis Puslat KP adalah terselenggaranya pelatihan kelautan dan pelatihan sesuai standar kompetensi dan kebutuhan. Pada tahun 2013, Puslat KP menetapkan jumlah lulusan pelatihan yang sesuai standar kompetensi dan kebutuhan sebanyak 13.900 orang terdiri dari 12.000 orang masyarakat dan 1.900 orang aparatur. Jumlah ini akan terus meningkat hingga mencapai sebanyak 17.200 orang, yang terdiri dari 15.000 masyarakat dan 2.200 aparatur di tahun 2014.

Total lulusan pelatihan yang akan dihasilkan sebanyak 47.000 orang dari kalangan masyarakat dan 8.000 aparatur dalam tahun 2010-2014.



Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pelatihan Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014.

MELAHIRKAN SDM TERAMPIL, MANDIRI DAN SEJAHTERA

Para purnawidya lulusan kegiatan pelatihan Puslat diharapkan memiliki ciri-ciri berjenjang yaitu:

1. Terampil (memiliki kompetensi sehingga mampu menerapkan hasil pembelajaran selama pelatihan).
2. Mandiri (dapat mengakses dana dan sumber daya bisnis lainnya karena unit bisnisnya yang bankable).
3. Sejahtera (dapat mengembangkan usaha yang layak dan semakin mampu bersaing).

Kebutuhan sumber daya yang kompeten akan dipenuhi secara sistematis melalui penyelenggaraan

1. Semakin beragamnya jenis-jenis pekerjaan untuk masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melengkapi



semakin jelas, semakin terencana pengembangannya dan semakin meningkat kualitas pelakunya.

3. Jenis-jenis pekerjaan kelautan dan perikanan semakin menarik dan diminati masyarakat luas karena mendukung terciptanya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan yang menjamin keberlanjutan bisnis, sumber daya dan masyarakatnya .

4. Mendorong semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang terlibat dalam bisnis kelautan dan perikanan sehingga cita-cita masyarakat Indonesia menjadi masyarakat maritim yang sesungguhnya dapat terwujud (*genuine maritime society*), khususnya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan.



Klaster Usaha

Sebagai

Inkubator Bisnis



PENGEMBANGAN KLUSTER USAHA

Bisnis di sektor perikanan sampai saat ini masih sulit menarik sektor pendanaan. Telah banyak cara yang diupayakan untuk mengatasi masalah tersebut namun belum memberikan dampak yang cukup signifikan. Salah satunya melalui P2MKP, penumbuhan pelaku usaha baru maupun pembentukan kelompok usaha.

Dimasa yang akan datang pemikiran dan upaya-upaya untuk memperkuat sektor bisnis perikanan masyarakat harus terus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Hanya melalui visi

besar, komitmen jangka panjang yang disinergikan dengan implementasi yang menjawab tuntutan jaman maka apa yang dicita-citakan, yaitu menjadikan sektor bisnis perikanan semakin menarik

minat masyarakat dan menguntungkan dapat dicapai. Paradigma dan pendekatan baru harus ditumbuhkan.

Puslat telah melakukan beberapa inisiatif untuk membantu membangun kemajuan daerah pesisir dan perikanan darat melalui penciptaan inkubator-inkubator bisnis. Inisiatif ini dimotori para alumni pelatihan P2MKP dengan mengembangkan program kemitraan dengan konsep klaster usaha.

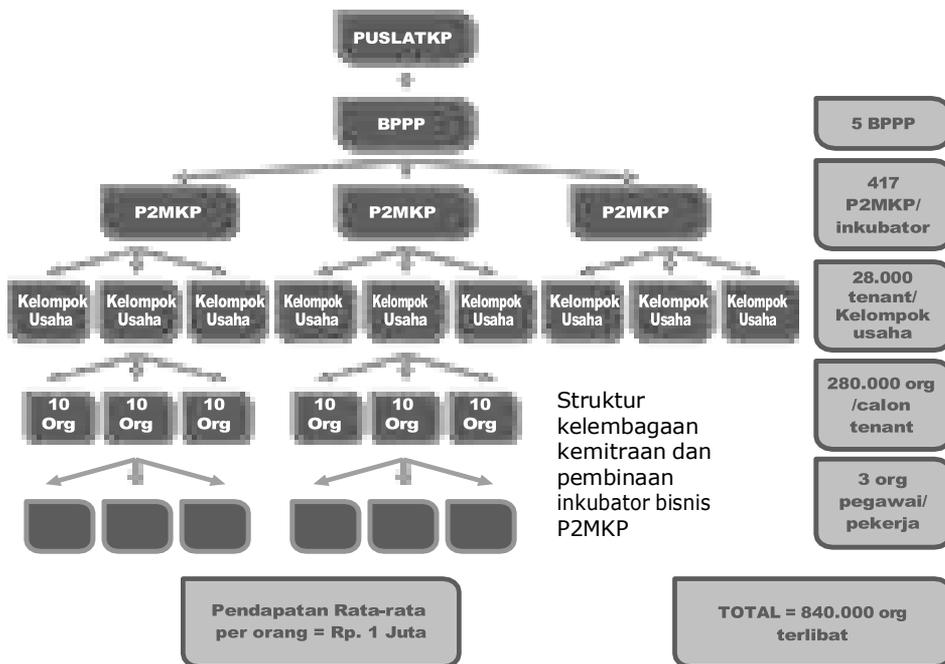
Ide besar dari konsep pengembangan klaster usaha ini berbasis pada pembinaan klaster baik berupa kawasan maupun rantai bisnis yang terintegrasi berkesinambungan dan multi sektoral dengan melibatkan berbagai *stakeholder*. Melalui konsep ini maka pembinaan

akan dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke-hilir dan berkesinambungan sehingga nantinya mampu menciptakan kemandirian bagi para pelakunya.

Tujuan, cita-cita besar dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah :

- Mengembangkan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi kawasan di pedesaan ataupun di perkotaan.
- Mengembangkan Program Kemitraan berbasis klasifikasi P2MKP dan alumni Pelatihan (purnawidya).
- Mensinergikan antara pelaksanaan Program Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Struktur kemitraan yang di bangun antara P2MKP dengan Alumni Pelatihan di gambarkan sebagai berikut :

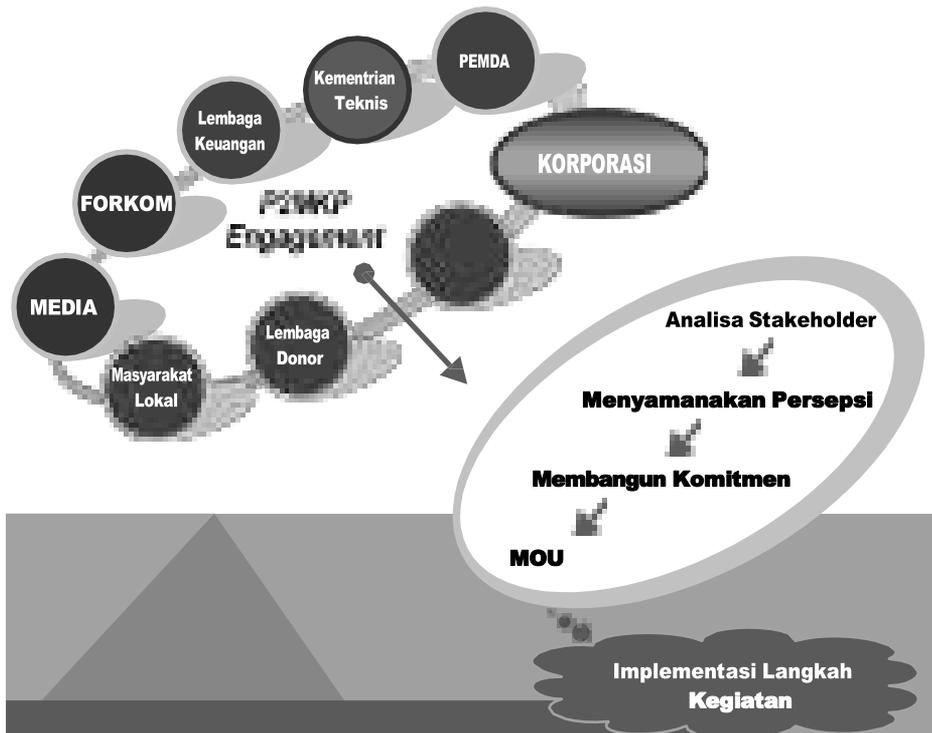


Melalui pengembangan program kluster usaha yang dikelola dengan penuh komitmen dan tanggungjawab, kedepan diharapkan tercipta manfaat bagi masyarakat dan membantu program pemerintah untuk mengurangi derasnya arus urbanisasi dari desa ke kota melalui pembukaan lapangan kerja baru di pedesaan dan perkotaan. Melalui upaya ini diharapkan masyarakat dapat

meningkatkan kondisi perekonomiannya. Disisi lain keberadaan program yang dirancang untuk memberikan manfaat seoptimal mungkin bagi masyarakat ini diharapkan dapat mengoptimalkan kemanfaatan dana-dana kepedulian sosial (*Corporate Social Responsibility-CSR*) bagi masyarakat khususnya masyarakat pedesaan.

MEMBANGUN KLASTER USAHA PERIKANAN DENGAN P2MKP SEBAGAI INKUBATOR

STAKE HOLDER yang terlibat



PENGUATAN JEJARING P2MKP

Kluster usaha perikanan yang dibentuk akan menjadi sarana replikasi bagi purnawidya untuk memulai kegiatan sebagai wirausahawan baru. Berkumpulnya begitu banyak pengusaha, baik yang sudah lebih dulu berbisnis atau yang baru akan membuat kelompok atau orang yang berada dalam kluster usaha ini memiliki jaringan yang semakin luas dan kuat. Cara ini merupakan solusi bagi para purnawidya untuk menerapkan ilmu dan keterampilan serta mewujudkan cita-cita menjadi wirausaha setelah mengikuti pelatihan.

Dalam kaitan kegiatan ini P2MKP akan dipandang sebagai kelembagaan terstruktur yang memiliki citra baik dan terpercaya bagi usaha perikanan, masyarakat dan dunia usaha. Gagasan inkubator bisnis yang dilakukan secara berkelanjutan ini juga dapat dipandang sebagai investasi yang nantinya diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan sektor perikanan melalui pelaksanaan praktek-praktek bisnis profesional dan pengembangan partnership usaha.

Jenis bantuan pengembangan yang telah dilakukan Puslat BPSDM KP meliputi :

1. Pembuatan peta potensi.
2. Penentuan piloting kegiatan.
3. Pembuatan role model kegiatan.
4. Melakukan inisiasi kegiatan capacity building.
5. Pendampingan manajemen usaha
6. Membantu akses permodalan dan pengembangan usaha.
3. Pengembangan strategi pemasaran (marketing);
4. Membantu dalam manajemen akuntansi/keuangan;
5. Mentoring dan pelatihan bisnis;
6. Manajemen pengelolaan perusahaan dan budaya perusahaan;
7. Memberi pengenalan dan penekanan atas etika bisnis;
8. Memberikan informasi mengenai industri bisnis terkait secara umum;
9. Membantu hal-hal terkait dengan regulasi.

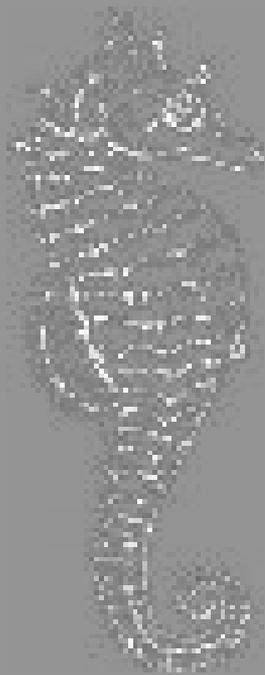
Adapun kegiatan yang telah dilakukan saat ini meliputi :

1. Akses dan bantuan permodalan;
2. Membuka jaringan yang terkait dan dapat membantu perkembangan usaha tersebut;

Kepedulian

Yang Mengubah

Kehidupan





“ *P2MKP memberikan paradigma baru mengenai cara memandang kesuksesan dalam berbisnis. Di P2MKP, sukses bukan hanya mengenai kesuksesan diri sendiri. Lebih jauh dari itu adalah mengenai bagaimana menularkan ilmu, menggerakkan energi dan semangat agar semakin banyak orang tergugah dan terdorong menjadi wirausaha mandiri. Kepedulian untuk mendedikasikan waktu dan ilmu agar dapat memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang itulah yang menjadikan P2MKP pelopor kemandirian yang patut diapresiasi dan terus didukung.*

Dr. Ir. Santoso, M.Phil

P2MKP : PELOPOR KEMANDIRIAN

Barisan wirausaha mandiri kelautan dan perikanan tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Ditengah kesibukan mengelola bisnis, tanpa kenal lelah mereka terus menularkan ilmu dan semangat kewirausahaan kepada masyarakat dilingkungannya. Berbagi ilmu bahkan hingga mancanegara, berbagai kepedulian dan memberikan kontribusi dalam melahirkan wirausaha baru yang akan menjadikan sektor kelautan dan perikanan semakin diminati.

“*Inilah saatnya mengubah cara pikir kita, bahwa ukuran ideal itu bukan siapa yang paling sukses, tapi siapa yang paling baik dalam melayani*”,
Albert Einstein.



DEJEEFISH (DJ)

SINERGI PEMBERDAYAAN MELALUI INTI PLASMA



Usaha yang dirintis Deni (De) yang berlatar belakang pendidikan informatika dan Jaka (Jee) seorang sarjana Perikanan yang bermula dari usaha pembenihan ikan Gurame pada tahun 2006, kini telah berkembang pesat. Berkibar dengan nama CV Dejeefish, usaha pembenihan ikan air tawar ini telah berkembang biak menjadi beberapa jenis usaha lainnya seperti : pengiriman ikan, penjualan alat bahan dan obat-obatan perikanan, pelatihan mandiri, penyewaan kendaraan angkut ikan (Dejee Car), pengolahan ikan (Dejee Food), *event organizer*, fashion dengan memproduksi baju/kaos bertema ikan sampai penjualan tiket pesawat terbang (Dejee Travel).

Sederet penghargaanpun telah berhasil diraih Dejeefish yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi ini dalam menunjang usahanya. Prestasi tersebut diantaranya :

1. Mengantongi 5 sertifikat CPIB dan 2 Sertifikat CBIB untuk komoditas Ikan Lele, Gurame, Patin, Nila dan Ikan Mas (terbanyak nasional) dari Dirjen Perbenihan KKP.
2. Peserta Pelatihan *International Aquaculture Training for ASEAN and Pacific* tahun 2012.
3. Juara Pertama Kategori Kinerja Terbaik P2MKP Nasional tahun 2012.
4. Juara Pertama stand Favorit pada acara Gelar Pelatihan Nasional (GPN) tahun 2012.
5. Penyuluh Swadaya terbaik se-Kabupaten Sukabumi.
6. Mengadakan pelatihan dengan jumlah peserta keseluruhan sebanyak 419 orang dalam kurun waktu satu tahun (2012).
7. Penghargaan Adibhakti Mina Bahari Kategori Kinerja P2MKP Terbaik Nasional 2013.
8. Pengiriman Ikan terbanyak domestik dari Bandara Soekarno-Hatta ke seluruh wilayah Indonesia (acuan data pengiriman dari kantor Balai Besar Karantina Ikan dan Tumbuhan Soekarno-Hatta tahun 2011-2013).

Apa yang dicapai Deni dan Jaka saat ini berawal dari keberanian mereka memulai usaha pembenihan ikan Gurame. Usaha yang terus berkembang pesat ini kemudian mendorong mereka menyewa kolam yang lebih besar dan menamai kelompoknya dengan nama Dejeefish, gabungan inisial nama depan pendirinya.

Seiring waktu permintaan benih Gurami Dejeefish terus bertambah, jenis ikan yang ditawarkanpun semakin beragam. Untuk meningkatkan usaha dan memperbesar kemampuan memenuhi kebutuhan pasar, Deni dan Jaka kemudian memutuskan mengajak para pembudidaya lain bergabung dan membentuk kelompok. Semangat dan kesamaan visi membuat tekad ini cepat terwujud. Hanya perlu tak lebih dari 1 tahun saja, kelompok pembudidaya dengan sistem inti plasma ini terbentuk.

Jalan sukses semakin terbentang. Dejeefish menyikapinya dengan membangun dan memperluas fasilitas budidaya sendiri, kolam dan *hatchery indoor* serta *outdoor*. Berbekal fasilitas tersebut Dejeefish memproduksi berbagai jenis ikan, terutama jenis-jenis ikan yang membutuhkan teknologi tinggi seperti Patin dan Baung. Untuk mengukuhkan kompetensinya, Dejeefish melengkapi diri dan telah mengantongi 4 Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang dikeluarkan oleh Ditjen Perikanan Budidaya KKP, untuk usaha pembenihan ikan Patin, Lele, Gurame dan Nila.

Berbekal pengalaman dan kesiapan untuk menyebarluaskan ilmu dan semangat kewirausahaan keberbagai pelosok Indonesia, Dejeefish kerap digandeng sebagai rekanan

Dinas Perikanan seluruh Indonesia atau Kementerian Kelautan dan Perikanan



dalam proyek pengadaan benih ikan yang bermutu.

Konsumennyaupun terus meluas dari berbagai lapisan masyarakat, baik pembudidaya yang sudah maju, maupun para pemula dibidang perikanan

budidaya. Dejeefish dipercaya masyarakat karena tidak hanya berorientasi menjual produk, tapi juga tak kenal lelah bersedia memberikan konsultasi gratis baik melalui telpon atau email. Beberapa pembudidaya yang tidak puas dengan konsultasi melalui telpon atau email, banyak yang memilih magang atau

ikut
praktek
langsung.

Tanpa pernah direncanakan sebelumnya, kondisi ini kemudian menginspirasi lahirnya pengembangan usaha baru yaitu penyedia jasa pelatihan dan perikanan yang dikelola secara profesional. Pada tahun 2010, Dejeefish telah terdaftar di Disnakertrans Sukabumi sebagai LPK Perikanan. Sebagai bukti keseriusan komitmen untuk menghasilkan tenaga

perikanan yang terampil, Dejeefish didukung tenaga pengajar para sarjana perikanan dan individu-individu yang berpengalaman dibidangnya.

Dejeefish tidak hanya melatih calon pembudidaya perorangan atau kelompok, tapi juga kerap melatih Pegawai Dinas Perikanan terutama penyuluh dan pengelola BBI. Kendati telah dikenal luas sebagai lembaga pelatihan yang kompeten, Dejeefish tetap menyediakan ruang bagi masyarakat yang berminat pada usaha pembudidayaan dengan menyelenggarakan pelatihan perikanan secara gratis. Hasilnya? Divisi pelatihan Dejeefish telah melahirkan ratusan pembudidaya ikan baru baik di Indonesia maupun di mancanegara.

Dengan berbagai prestasi dan modal kepedulian yang besar tersebut, Dejeefish telah bergabung dan ditetapkan sebagai Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM-KP) pada tahun 2010.

Melalui keterlibatan Dejeefish dalam barisan P2MKP, diharapkan akan lebih banyak lahir para pembudidaya baru, terutama bagi mereka yang memiliki minat besar, namun punya keterbatasan akses dan dana untuk mengikuti pelatihan. Kontribusi Dejeefish ini tentu besar maknanya untuk membantu mengurangi angka pengangguran dan menaikkan tarap hidup masyarakat.



CAKALANG FUFU SEDERHANA III

LEBIH NIKMAT DENGAN
SUKSES BERSAMA



Di Manado nama ikan asap Cakalang Fufu Sarce Kasim dikenal luas. Bermula dari usaha kecil-kecilan yang dikelola kedua orangtuanya, Cakalang Fufu Ibu Sarce Kasim, kini berkembang menjadi usaha skala kelompok yang dikenal dengan namakelompok Sederhana III. Sejak diambil alih pengelolannya oleh Ibu Sarce pada tahun 2008, usaha kedua orang tuanya tersebut maju pesat.

Perkembangan usaha yang signifikan tersebut dibuktikan peningkatan produksi dan omzet. Usaha yang awalnya hanya mempekerjakan 10 orang dengan kapasitas produksi mencapai 150 ekor/minggu, kini mampu menghasilkan

mencapai 600 ekor/minggu. Produk olahannyapun semakin beragam, tak lagi terbatas ikan asap saja, tapi juga abon Cakalang dan Bakasang (sejenis penyedap rasa berbentuk cair).

Cerita tentang pengembangan produk, tentu bukan hal mudah. Ditengah hambatan pengadaan bahan baku, sumberdaya manusia, hingga pembayaran yang sering tersendat, Ibu Sarce tetap teguh memperjuangkan impiannya. Perjuangannya mengembangkan Abon Cakalang salah satunya. Memulai produksi Abon Cakalang sebanyak 10 kg/minggu yang dipasarkan dari rumah kerumah, abon produksinya yang bermerek "Dahlia"

kini telah diproduksi hingga mencapai 50 kg/minggu yang membuat pendapatannya dari produk abon saja meningkat dari Rp 10 juta/bulan menjadi Rp 50 juta/bulan.

Pemasaran produk-produknya yang dulu terbatas hanya di pasar-pasar tradisional di sekitar Manado, sejak tahun 2010 juga telah merambah supermarket dan toko-toko oleh-oleh seperti : Jumbo dan Golden Supermarket, Multi Mart, Fresh Mart dan toko souvenir lainnya.

membuat produk-produknya dicari dan digemari.

Sejalan dengan perkembangan usaha yang signifikan tersebut, omzet Ibu Sarcepun meningkat tajam. Dari rata-rata sebulan mencapai Rp 36.000.000/bulan menjadi Rp 144.000.000/bulan. Dengan keberhasilan yang dicapainya, Ibu

Inovasi, kecermatan dan komitmen untuk selalu memomorsatukan kualitas bahan baku, sanitasi dan higienitas, teknis pengasapan, cita rasa dan pengemasan adalah resep jitu yang

Sarce terpanggil bergabung dengan P2MKP yang digagas BPSDM KP agar dapat menyebarluaskan ilmu dan keahlian yang dimilikinya.



CITRA HANDYCRAFT

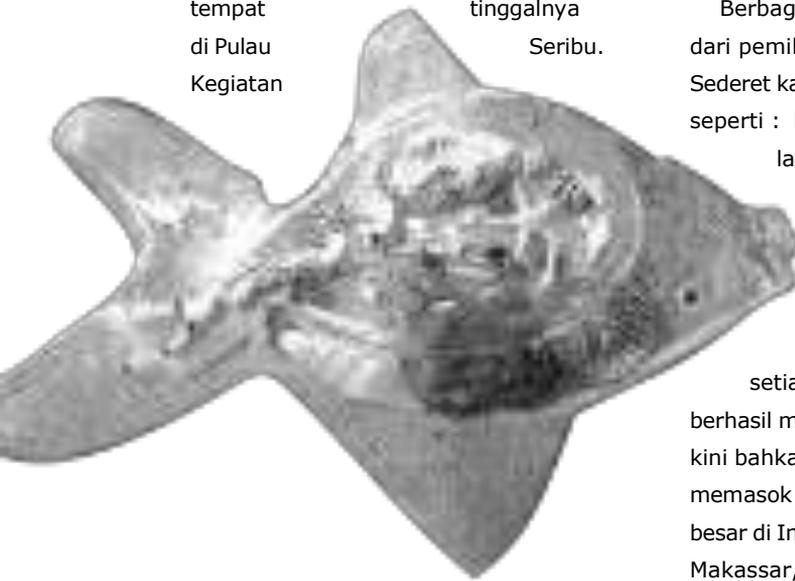
SUKSES MENGANGKAT CITRA INDONESIA



Peluang bisnis bisa muncul darimana saja. Bagi Sri Sulastri yang akrab di sapa Cici, keberuntungan hadir melalui limbah kulit kerang dan pasir laut yang mudah ditemukan disekitar tempat tinggalnya di Pulau Seribu. Kegiatan

yang telah ditekuninya sejak tahun 2009, ini, kemudian membawa Cici dan perusahaannya yaitu : Citra Handycraft dikenal dunia.

Berbagai kreasi mengesankan lahir dari pemikiran dan tangan kreatifnya. Sederet karya aksesories yang memukau seperti : lampu gantung, tirai dan lainnya, hingga cinderamata khas seperti ondel-ondel yang sangat khas Betawi lahir berkat kepiawaiannya. Dengan keunikan yang berhasil dihadirkan dalam setiap karyanya, Citra Handycraft berhasil menguasai pasar Indonesia dan kini bahkan dunia. Saat ini ia dipercaya memasok tidak kurang dari sebelas kota besar di Indonesia seperti : Palu, Kendari, Makassar, Tanjung Pinang, Surabaya,





Pangandaran, Bali, Kendari, Batam, Belitung Timur, Padang, Semarang, dan beberapa kota besar lainnya.

Pasar Internasionalpun takluk pada keindahan karyanya. Saat ini karya-karya Cici telah diterima pasar : Korea Selatan, Ukraina, Jerman, dan China. Rata-rata ia mengirimkan barang dua kali setahun, dengan keuntungan berkisar Rp 5 s.d. 7 juta. Disisi lain perkembangan pasar dalam negeri tidak kalah menarik. Dari pasar dalam negeri saja , wirausaha yang memulai usahanya dengan menjual karyanya kepada teman-teman

kampusnya ini mampu mencatat omzet berkisar Rp 30 juta hingga Rp 50 juta per-bulan.

Keberuntungan terus mengiringi langkahnya, salah satunya melalui pelatihan-pelatihan mandiri yang disponsori BPSDM KP. Keikutsertaan sebagai P2MKP serta pelatihan sebagai trainer dalam Training of Trainer (TOT) yang diselenggarakan dan dilatih BPPP Aertembaga membuat Cici semakin percaya diri untuk menyelenggarakan pelatihan dan menekuni usahanya.



TIGA DIVA

PRODUK PENGOLAHAN PERIKANAN YANG MENDUNIA



Kelompok pengolah hasil perikanan dari desa Gedangan, kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang dikenal dengan Tiga Diva ini dikenal karena memiliki inovasi dan kreativitas tinggi dalam teknologi pengolahan. Berbekal keahlian yang tidak banyak dimiliki orang lain, Tiga Diva mampu menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi yang diterima pasar : Amerika, Eropa, Korea, dan Jepang. Komoditas perikanan utama yang berhasil diolahnya menjadi istimewa meliputi : ikan bandeng, udang, surimi, mangrove, rumput laut, serta budidaya kepiting soka dan lele.

Menurut penuturan Adi Suseno, sang pemilik, Tiga Diva dirintis dengan modal awal tak lebih dari Rp 30 juta yang dialokasikan untuk pengadaan sarana budidaya. Produk utamanya saat itu adalah bandeng tanpa duri dengan skala produksi perbulan rata-rata mencapai 2.000 kg. Produk rintisan dan andalan tersebut mendapat respon yang sangat baik dari pasar, tak hanya di daerah Jawa saja tapi hingga berbagai pelosok Sumatera dan beberapa wilayah lainnya.

Dihari-hari besar, libur dan tanggal merah permintaan bahkan melonjak hingga 100%. Selain bandeng tanpa duri, Tiga Diva juga memproduksi : bahan

baku bakso, nugget, krupuk kalsium, otak-otak, presto, bandeng asap, dan crispy bandeng tanpa duri serta bahan olahan rumput laut seperti : dodol, sirup, atau permen selai juga mulai dikenal dan diminati masyarakat.

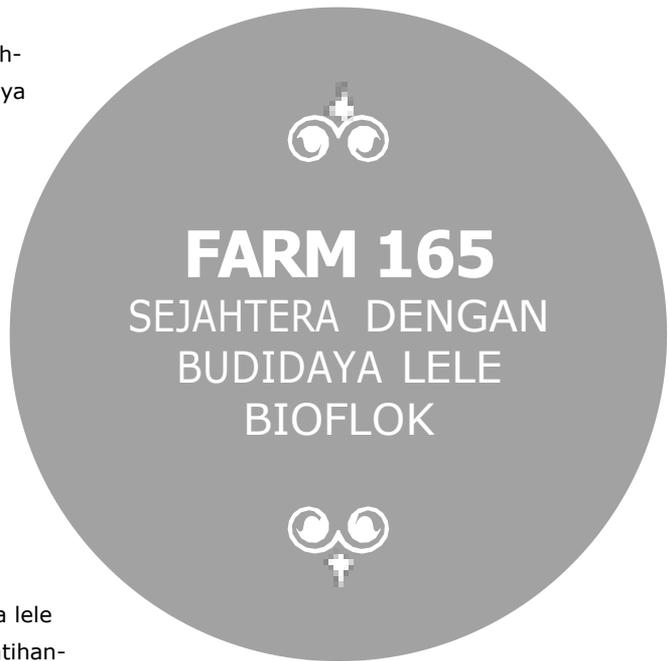
Seiring peningkatan volume usaha serta untuk terus meningkatkan kualitas produksinya, Tiga Diva merekrut tenaga-tenaga profesional mumpuni , serta tenaga kerja harian untuk mengantisipasi lonjakan permintaan terutama di hari-hari khusus.

Adi Suseno selaku peminan kelompok mengakumendapatkan ilmu dan keterampilan lebih setelah mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan BPSDMKP. Setelah usahanya semakin berkembang, dan Tiga Diva bergabung dalam P2MKP, Tiga Diva tergugah dan terpanggil untuk terlibat aktif dalam pelatihan-pelatihan masyarakat. Melalui kiprah di P2MKP, Tiga Diva membagikan keahlian pengolahan hasil perikanan yang menjadi keunggulannya kepada masyarakat yang berminat.

Budidaya ikan lele itu susah-susah gampang. Seluruhnya tergantung kreativitas si pembudidaya dalam memilih cara pengelolaannya. Penyediaan kolamnya juga tidak rumit. Kalau mau mudah, manfaatkan saja pekarangan rumah yang ada. Contoh suksesnya sudah banyak. Salah satunya keberhasilan seorang mantan pegawai BUMN Legisan S. Samtafir dengan P2MKP Farm 165.

Ide untuk melakukan budidaya lele muncul setelah ia mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan BPSDM KP.Keputusannya bulat setelah ia melihat langsung usaha budidaya lele bioflok di sejumlah wilayah seperti : di daerah WiradeasPemalang dan Pekalongan, serta P2MKPMina Pantura. Untuk memulai usahanya, iapun tak ragu melepas mobil kesayangannya.

Itu cerita dulu, saat awal ia merintis usaha. Saat ini Legisan bukan lagi 'pemain pemula', ia bahkan sudah sangat populer dikalangan penggiatP2MKP serta pembudidaya ikan lele didaerah Jawa Barat dan Jawa Tengah.Bahkan karena aktivitas pelatihan-pelatihandan penyuluhan yang rajin ia lakukan, Legisan juga mulai dikenal luas para penyuluh perikanan di beberapa Provinsi.



Kesibukannya memberikan pelatihan dan penyuluhan semakin padat setelah ia bergabung dan ditetapkan sebagai P2MKP. Dengan keterlibatan di P2MKP tersebut, pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan Farm 165 tak lagi sebatas di wilayah Indonesia, tapi sudah meluas hingga negara tetangga. Beberapa kelompok pembudidaya lele dari berbagai negara tetangga seperti : Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam banyak yang telah mengikuti pelatihan dan magang yang diselenggarakan P2MKP Farm 165.

Bioflok adalah teknologi yang memanfaatkan metabolisme tubuh ikanyang mengandung nitrogen untuk diubah menjadi protein, sehingga ikan

memperoleh protein tambahan, selain dari pakan yang diberikan. Legisan menuturkan bahwa budidaya dengan sistem air tertutup dan adopsi sistem bioflok sangat sederhana. Cara ini tidak saja mampu menekan biaya pakan, tetapi juga meningkatkan kepadatan tebar sekaligus menurunkan biaya produksi benihnya.

Memulai budidaya bioflok tidak perlu lahan dan modal besar. Di pekarangan rumah seluas 15 m² saja, sudah dapat membuat 2 kolam. Untuk satu kolam, selama satu siklus panen, dari mulai benih, pakan, dan bak budidaya cuma memerlukan investasi Rp. 6.500.000,

sementara keuntungan yang diperolehnya bisa mencapai Rp. 3.500.000 per-kolam bioflok. Dengan satu siklus panen kurang lebih antara 2,5-3 bulan, per-1 kg berisi 8 sampai 10 ekor lele.

Berkat pengalamannya, Legisan melalui Farm 165 digandeng berbagai pihak untuk menyelenggarakan program pelatihan bioflok. Bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Farm 165 juga mengadakan pelatihan dan pendidikan dasar kepada masyarakat yang tertarik melakukan budidaya ikan lele dengan teknik bioflok.

Papua menyimpan panorama yang indah. Diantara begitu banyak keindahan Papua yang menakjubkan terdapat Danau Sentani yang terletak ditengah-tengah kabupaten Jayapura. Danau Sentani diyakini masyarakat merupakan anugerah Tuhan yang menjadi sumber mata pencaharian dan kehidupan bagi masyarakat sekitarnya. Di Danau Sentani yang menjadi ikon kabupaten Jayapura tersebut , juga tersimpan kekayaan alam berupa berbagai jenis ikan yang oleh masyarakat sekitardiolah menjadi kerupuk dan abon ikan.

Menyadari potensi yang demikian besar yang tersimpan di dalam danau Sentani, masyarakat sekitar kemudian membentuk kelompok pengolah dan pemasar ikan dengan nama Sentani Foi. Nama yang unik ini menggabungkan kata Sentani dengan "Foi" yang berarti "selamat". Sentani Foi memutuskan serius menggarap produksi kerupuk dan abon ikan gabus karena berdasarkan analisa pasar yang dilakukannya menunjukkan bahwa kedua jenis produk olahan tersebut sangat diminati oleh masyarakat di sekitar Danau Sentani.

Melalui Sentani Foi, potensi ikan gabus Danau Sentani mulai terangkat dan dikenal luas.

Ikan gabus Danau Sentani istimewa dan berbeda karena memiliki tingkat kesegaran dan nilai kandungangizi yang tinggi. Warnanya juga lebih putih dan tidak amis. Tingginya kandungan gizi tersebut tentu sangat bermanfaat untuk membantu menjaga kesehatan tubuh orang yang mengkonsumsinya.

Sentani Foi yang aktif mengembangkan produk olahan khas ikan Danau Sentani dikukuhkanpendiriannya tanggal 1 Desember 2009. Didirikan 7 (tujuh) orang dengan ketua pengelola Evisi Omista, Sentani Foi aktif mengikuti berbagai pelatihan yangdiadakan BPSDM KP sejak tahun 2013. Berbekal jejak rekam dan keseriusan menekuni pengolahan ikan dan pelatihan maka pada bulan September 2013, Sentani Foi dikukuhkan sebagai P2MKP sekaligus mendapatkan kepercayaan dari Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPSDM KP (Puslat BPSDM KP) untuk melaksanakan program pelatihan kepada masyarakat sekitar.

Setelah ditetapkan sebagaiP2MKP, Evisi Omista diberikan kesempatan mengikutiTOT (Training of Trainer) dengan pelatihdan penyelenggara pelatihan BPPPAmboin. Dampak pelatihan tersebut diakuinya sangat positifdan menjadikannya semakin percaya diri dalam menyelenggaraan dan memberikan pelatihan kepada masyarakat.



**GRIYA KARYA
TIARA KUSUMA**
KREASI MANGROVE
YANG MEMPESONA



Sebuah kesempatan kedua, kesempatan sembuh dari kelumpuhan telah membawa Ibu Lulut Sri Yuliani bangkit sebagai pejuang lingkungan yang tangguh. Meneliti dan mengembangkan produk berbahan dasar bakau (mangrove) seperti : batik, sirup, tempe, tepung, dan lainnya, melatih sekitar 15 angkatan atau sekitar 500 orang melalui program pelatihannya, dan memperjuangkan paten dari UNESCO. “ Hak paten ini sangat penting untuk melindungi produk batik yang sudah kami rintis agar tidak terjadi permasalahan yang tidak diinginkan dikemudian hari”, ungkapnya.

Ketekunan dan kegigihan, ibu guru yang juga sempat dipercaya sebagai kepala sekolah ini telah membuatnya meraih berbagai penghargaan seperti : Pejuang Lingkungan Kota Surabaya (2006), juara ke-2 Guru Musik Teladan se-Jatim (1996), penghargaan sebagai Perintis Lingkungan Kota dari Walikota Surabaya, serta penghargaan program Pemberdayaan Masyarakat dari Walikota Surabaya.

Kelompok Griya Karya Tiara Kusuma yang didirikan Lulut Sri Yuliani lebih mengenal manfaat pelatihan setelah rajin mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan BPSDMKP. Keikutsertaan sebagai P2MKP dan kesempatan mengikuti TOT (*Training of Trainer*) dengan pelatih dan penyelenggara pelatihan dari BPPP Tegal membuatnya semakin mantap membagi ilmunya kepada masyarakat. Hal

yang sejalan dengan tekadnya, setelah terbebas dari ancaman stroke yang membuatnya hampir menemui ajal.

Penguatan Griya Karya Tiara Kusuma sebagai kelompok P2MKP melapangkan tekad dan niatnya untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam proses peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukannya. Ibu Lulut melalui Griya Karya Tiara Kusuma patut diapresiasi inovasi dan kreativitasnya karena disamping menghasilkan produk yang bernilai tambah, mereka juga mengembangkan cara-cara yang selaras dengan upaya-upaya pelestarian lingkungan.

Untuk memperluas spektrum pelatihannya, Ibu Lulut bahkan menggandeng berbagai pihak seperti : kerjasama dengan BPPP Banyuwangi, memanfaatkan dana swadaya masyarakat, kerjasama dengan Pemda dan melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari perusahaan perbankan serta industri lainnya.





**INOVATOR GARAM BAPAK DRADJAT
DENGAN IBU MENTERI KP, SUSI PUDJIASTUTI**



DRADJAT

TITIK CERAH GARAM RAKYAT DARI TEKNOLOGI ULIR FILTER



Indonesia sudah berswasembada garam, tetapi baru sebatas garam konsumsi. Untuk garam industri, Indonesia masih mengimpor sekitar 2,3 juta ton per tahun (2013). Untuk bisa memenuhi kebutuhan garam industri, diperlukan lahan garam sekitar 28.000 ha, dengan asumsi rata-rata produksi mencapai 80 ton per ha. Kenyataannya saat ini, rata-rata produksi garam petani hanya sekitar 60 ton hingga 80 ton per ha.

Ditengah pesimisme tentang rendahnya produksi garam nasional untuk garam industry tersebut, secerah harapan ditebarkan Salah satu upaya BPPP di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan ialah pengembangan teknologi ulir filter dengan pak Drajat didalamnya. Dengan teknologi tersebut, produktivitas

garam bisa mencapai 150 ton per ha. Kandungan Sodium Clorida (NaCl) pada garam juga mencapai lebih dari 94 persen, sehingga bisa memenuhi standar garam industri.

Melalui teknologi ulir filternya, ia mampu memproses air laut hingga memiliki kepekatan tinggi, atau yang oleh petani biasa disebut air tua. Salah satu upaya BPPP di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan ialah pengembangan teknologi ulir filter tersebut. Dengan teknologi itu, produktivitas garam bisa mencapai 150 ton per ha. Kandungan Sodium Clorida (NaCl) pada garam juga mencapai lebih dari 94 persen, sehingga bisa memenuhi standar garam industri.

Caranya, air yang sudah difilter dari kolam ulir dialirkan menuju penampungan



air tua, yang memiliki kedalaman 2 meter. Selanjutnya apabila tingkat kepekatan air sudah tinggi, air akan dialirkan ke lahan yang disebut meja Kristal. Memerlukan waktu sekitar 10 hari sebelum akhirnya air tersebut berubah bentuk membentuk kristal garam yang siap panen.

Garam yang dihasilkan melalui proses ini berwarna putih dan bersih, karena impuritiesnya yang mengendap sempurna. Jika dihitung sejak proses awal, keseluruhan prosesnya membutuhkan waktu sekitar 24 hari, berbeda dengan metode konvensional yang selama ini biasa dilakukan petani yang usia pengolahan garamnya sejak peminihan

hingga menghasilkan kristal garam membutuhkan waktu sekitar 28 hari.

Karena lahan untuk peminihan pada metode konvensional merupakan lahan rata, impuritiesnya tidak bisa sempurna mengendap, sehingga warna garam cenderung kusam atau kehitam-hitaman. Dengan metode konvensional tersebut kadar NaCl garamnya juga rendah, biasanya dibawah 90 persen. Hal tersebut terjadi karena tingkat kepekatan air saat dilepas ke meja kristal masih di bawah 20 derajat BE. Kondisi tersebut menyebabkan garam dengan pengolahan konvensional tidak bisa diterima untuk garam industri.

Menurut Drajat, selama ini rata-rata tingkat kepekatan air laut di pantai utara sekitar 3 derajat BE (baume meter), sementara untuk bisa menghasilkan garam industri derajat kepekatan air laut minimal harus 20 derajat BE. Dari hasil percobaan yang dilakukannya, dengan mengolah air laut yang memiliki tingkat kepekatan 20 derajat BE, dapat dihasilkan garam dengan NaCl sekitar 95 persen. Garam jenis ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri es, kulit, dan tekstil.

Adapun garam untuk memenuhi kebutuhan industri pengeboran minyak dan farmasi membutuhkan garam dengan kandungan NaCl 97,4 hingga 99 persen. Untuk menghasilkan garam dengan kadar NaCl setinggi itu, dibutuhkan tingkat kepekatan air antara 25 hingga 29,5 derajat BE.

Langkah sederhana namun berdampak signifikan ini, nantinya diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada garam impor.

Daftar Pustaka

1. Akintoye, A. S dan MacLeod, M. J. 1996. Risk Analysis and Management in Contruction. International Journal of Project Management. Vol. 15, No. 1, pp. 31-38.
2. Alma, B. 2004. Kewirausahaan. Bandung: CV. Alfabeta
3. Alabi, Goski., & Alabi, J. (2014). Understanding the Factors that Influence Leadership Effectiveness of Deans in Ghana. JHEA/RESA Vol. 12, No 1 , 2014, pp. 111-132
4. Casimir, G., Waldman, D.A., Bartram, T., & Yang. S. (2006). Trust and the Relationship Between Leadership and Follower Performance: Journal of Leadership & Orgnizational Studies. 12 (3): 68-85.
5. Chinomona, R., Mashiloane, M., & Pooe, D. (2013). The Influence of Servant Leadership on Employee Trust in a Leader and Commitment to the Organization. Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy Vol 4 No 14 November 2013: 405-414.
6. Dhewanto, W. dkk. (2013). Inovasi Dan Kewirausahaan Sosial Panduan Dasar Menjadi Agen Perubahan. Alfabeta.
7. Farkan, M. 2006. Menunggu Sentuhan Untuk Dijadikan Wahana Wisata Riset Dan Sejarah Jurnal Samudra Biru ISSN 1858-0211, Maret 2006, halaman 14.
8. Farkan,M; dan Mulyono,M. 2011. Dasar Dasar Budidaya Perikanan, STP Pres, Jakarta. ISBN. 9-786029-633597.
9. Farkan, M; Kristiantiny, MGE, Yulianta,E; Margono. 2013. Sukses Produksi Ikan Lele. Pusat Pelatihan Kelauatn dan Perikanan. Jakarta. ISBN 978-602-70414-0-0.
10. Farkan, M dan Darwis. 2013. Kajian Manajemen Lingkungan Dan Aplikasi Probiotik Pada Budidaya Udang Vaname Di Tambak PT Maju Makmur , Bakauheni, Lampung Selatan. Jurnal Mitra Bahari Vol.7 No. 1 Januari - April 2013 ISSN 0216-4841 ,halaman 77.
11. Howell, M.J & Merenda, H.E.K. 1999. The Ties That Bind: The Impact of Leader-Member Exchange, Transformational and Transactional Leadership, and Distance on Predicting Follower Performance. Journal of Applied Psychology. Vol.84, No.5, P.680-694.
12. Hulgård, L. (2010). Discourses of social entrepreneurship–Variations of the same theme? SE Field, 10, 1–21.
13. Heri, S. 2012. Pengaruh Orientasi Pasar, Orientasi Teknologi Dan Inovasi Produk Terhadap Keunggulan Bersaing Usaha Songket Skala Kecil Di Kota Palembang. Jurnal Orasi Bisnis Edisi ke-VIII, November, 12-19
14. Hasibuan., & Malayu S.P (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta PT. Bumi Aksara
15. Kuratko & Hoodgets. 2007. Dalam Heru Kristanto. 2009. Kewirausahaan (entrepreneurship) Pendekatan Manajemen dan praktik. Yogyakarta:Graha Ilmu.
16. Kasmir. 2010. Kewirausahaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
17. Kartina, AM dan Farkan,M. 2012. Studi Potensi Pulau Lima Teluk Banten. Jurnal Mitra Bahari Vol.6 No. 1 April – Juli 2012 ISSN 0216-4841,halaman 37.
18. Seelos, C., Mair, J., Battilana, J., & Tina Dacin, M. (2011). The Embeddedness of Social Entrepreneurship: Understanding Variation across Local Communities. 33, 333–363.
19. Siagian., & Sondang, P. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara



BPSOM KP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan
Jl. Medan Merdeka Timur No. 3E

